

No. 160 Mei - Juni 2019

BaKTI**News**

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



MLM IVA SADANIS
SATU WANITA MENYELAMATKAN
WANITA LAINNYA

KERJA IKHLAS
DI SUATOR

BANJIR BANDANG SENTANI
AMUK MAMA ROB HONG HOLO

BERPIHAK PADA REALITAS
PENGALAMAN PENYUSUNAN
PERDA RESPONSIF GENDER
DAN INKLUSIF

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771 979 777 057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL

Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU
FADHILAH MANSYUR

Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**

Database
Kontak **INDINA ISBACH**

Design & layout
Editor Foto **FRANS GOSALI**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

*Contributing to BaKTI**NEWS***

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1000 - 1100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.*

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

*Subscribing to BaKTI**News***

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

*To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.*

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTINews

Mei - Juni 2019

No. 160

- 1** MLM IVA SADANIS
Satu Wanita Menyelamatkan
Wanita Lainnya
Oleh **SRI RAHMA**
- 5** Berpihak Pada Realitas
Pengalaman Penyusunan
Perda Responsif Gender & Inklusif
Oleh **LUSIA PALULUNGAN**
- 9** Keju Dangke
di Langit Enrekang
Oleh **AHMAD ERANI YUSTIKA**
- 13** Banjir Bandang Sentani :
Amuk Mama Robhong Holo
Oleh **RESTU DIANTINA PUTRI**
- 17** Apa yang Perlu Diketahui Tentang
Dasar-Dasar Feminisme
(Bagian 2) Selesai
Oleh **NADYA KARIMA MELATI**
- 21** Akalbilan Primadona Hambar
Oleh **YUNI BAUN**
- 25** MELAYANI,
Solusi Layanan Dasar di Indonesia
Oleh **AFRIZAL ABDUL RASYID**
- 29** Kerja Ikhlas di Suator
Oleh **LUNA VIDYA, DESY MUTIALIM**
dan **RAHMAN RAMLAN**
- 33** Merawat Kepedulian Masyarakat
Catatan tentang *Shelter* warga
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 37** Menuntaskan Akses Sanitasi dan
Air Bersih dengan Dana Desa
Oleh **HAMSAH SINRING**
- 39** Iklan BaKTINews Online
- 40** Kegiatan di BaKTI
- 41** Info Buku

■ Foto Cover : Yusuf Ahmad/Reuters

SELAMAT
HARI RAYA

Idul Fitri

I SYAWAL 1440 H

MOHON MAAF LAHIR & BATIN

MLM IVA SADANIS

Satu Wanita Menyelamatkan
Wanita Lainnya

Oleh **SRI RAHMA**



Foto : cancerresearchuk.org

Di Indonesia angka kejadian kanker serviks terus meningkat setiap tahunnya dengan peningkatan sekitar 15.000 kasus, dan 7.493 diantaranya berakhir dengan kematian. Hal ini disebabkan karena hampir 70% kasus baru ditemukan sudah dalam keadaan stadium lanjut. Tingginya angka kejadian kanker serviks di Indonesia tersebut merupakan angka kejadian kanker serviks tertinggi di dunia.

Para ahli memperkirakan bahwa 40% kanker dapat dicegah dengan mengurangi faktor risiko terjadinya kanker tersebut, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah faktor risiko tersebut dengan peningkatan program pencegahan dan penanggulangan yang tepat. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan insiden dan kematian yang disebabkan oleh kanker serviks yaitu melalui pendekatan terapi maupun pencegahan faktor risiko. Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) merupakan metode yang dapat dilakukan secara massal dan murah serta hasilnya lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan metode tes *pap smear*. Menurut penelitian Rasjidi, sensitivitas IVA untuk mendeteksi kanker serviks sebesar 75%, dengan spesifisitas sebesar 85% serta hasil pemeriksaan IVA yang positif menunjukkan adanya lesi prakanker serviks. Deteksi dini kanker payudara dapat dilakukan dengan Periksa Payudara Sendiri (SADARI), atau Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS) oleh petugas kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016 tercatat 170 kasus kanker payudara, dan dari 317 perempuan kasusnya terdeteksi melalui pemeriksaan SADANIS. Sementara kasus kanker leher rahim di Sulawesi Selatan sebanyak 460 kasus.

Target Nasional IVA SADANIS tahun 2019 yakni 50% pada Wanita Usia Subur (WUS) umur 30-50 tahun yang sudah menikah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Finaninda tahun 2016, menunjukkan bahwa pemberian informasi (dalam bentuk promosi dan edukasi) kepada wanita usia subur sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan pemeriksaan IVA.

Kanker tertinggi di Indonesia pada perempuan adalah kanker payudara dan kanker leher rahim. Kasus rawat inap kanker payudara sebesar 12.014 kasus (28,7%) sedangkan kanker leher rahim sebesar 5.349 kasus (12,8%).

Cakupan deteksi dini IVA SADANIS Kabupaten Sinjai tahun 2016 adalah 613 orang dari target 3.379 orang. Tahun 2017, 1.507 orang dari target 10.122 orang. Target IVA SADANIS khususnya untuk Puskesmas Aska pada Tahun 2016 sebanyak 342 orang dengan pencapaian 53 orang (13%) dengan target 50%.

Berawal dari pengalaman bidan koordinator Puskesmas Aska sebagai tim Pemeriksaan IVA SADANIS. Pada bulan Agustus 2016 ditemukan Wanita Usia Subur usia 20 tahun positif IVA, wanita usia subur usia 30-40 tahun tumor payudara sebanyak 3 orang dan kasus kematian 3 wanita usia subur dengan Kanker Payudara pada tahun 2015. Kondisi tersebut membuka mata Bidan Koordinator Puskesmas Aska untuk melakukan langkah pro aktif sebagai *screening* Kanker Leher rahim dan Kanker Payudara melalui pemeriksaan dini IVA SADANIS. Ide tersebut dikomunikasikan ke Kepala Puskesmas, dan berdasarkan hasil pertemuan lokakarya mini Puskesmas Aska pada tanggal 28 September 2016 diputuskan untuk dijadikan inovasi Puskesmas Aska. Keputusan rapat tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas No 67.1 Tahun 2016 dengan nama MLM IVA SADANIS. Kegiatan MLM IVA SADANIS dilaksanakan oleh Tim Puskesmas Aska yang terdiri dari bidan koordinator, bidan desa, dokter dan petugas program Penyakit Tidak Menular. Serta kolaborasi dengan beberapa unsur terkait, yaitu: Pemerintah (Dinas Kesehatan, Puskesmas, kelurahan, kecamatan), TIM PKK dan masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan, majelis taklim),

Metode MLM IVA SADANIS ini menggunakan sistem *multilevel marketing* dimana satu wanita yang sudah diperiksa IVA SADANIS mengajak dua wanita lainnya untuk melakukan pemeriksaan IVA SADANIS, hal ini berlaku secara jejaring. Sistem ini hanya dipakai pada multilevel barang atau produk. Melalui metode ini diharapkan dapat menjangkau semua wanita usia subur untuk melakukan deteksi IVA SADANIS. Secara tidak langsung dapat

meminimalisir risiko kanker leher rahim. Dalam pelayanan IVA SADANIS ini dilakukan oleh tim petugas kesehatan yakni dokter, bidan terlatih IVA SADANIS, Petugas Penyakit Tidak Menular (PTM) memberikan pelayanan. Tim Promosi Kesehatan yang melakukan sosialisasi MLM IVA SADANIS sehingga masyarakat bisa mengetahui apa dan bagaimana inovasi tersebut.

Tim leader MLM ini bekerja sama dengan tim penggerak PKK sebagai perpanjangan tangan dari tim inovasi ini untuk mempromosikan dan mensosialisasikan MLM IVA SADANIS. Tim penggerak PKK adalah kelompok masyarakat yang dekat wanita yang menjadi sasaran dari inovasi MLM IVA SADANIS.

Selama kurun waktu 1 tahun, wanita usia subur yang telah melakukan pemeriksaan IVA SADANIS yang semula hanya 53 menjadi 319 wanita yang kemudian direkrut menjadi agen. Wanita usia subur yang terekrut dalam agen dibekali metode merekrut wanita usia subur lainnya dengan menggunakan kartu keanggotaannya sebagai media promosi.

Perkrutan anggota dimulai dengan melakukan pendekatan kepada 53 wanita usia subur yang telah diperiksa pada bulan Oktober 2016. Dari 53 wanita usia subur yang menyetujui untuk menjadi 'agen' sebanyak 43 orang, dan dari hasil rekrutan ini berkontribusi untuk mengajak wanita lainnya sehingga membentuk jejaring. Setelah agen MLM IVA SADANIS menemukan jejaring, agen mengantar ke tempat pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas Pembantu atau Puskesmas.

- 1 Pemeriksaan IVA SADANIS yang dilakukan oleh petugas Puskesmas. Jika hasil pemeriksaan positif akan ditindaklanjuti dengan terapi.
- 2 Konseling oleh petugas dan komitmen kerjasama untuk mengajak 2 wanita lain yang tertera dalam kartu dan terdaftar di sistem jejaring MLM IVA SADANIS yang dilaksanakan pada 3 Pustu 1 Puskesmas.
- 3 Pencatatan dan pelaporan dalam register keanggotaan MLM IVA SADANIS dan dalam bentuk jejaring.
- 4 Melatih agen dan anggota MLM IVA SADANIS dan jejaringnya sebagai fasilitator. Agen atau anggota MLM IVA SADANIS yang sudah melakukan pemeriksaan IVA SADANIS menjadi ujung tombak inovasi ini.

Sebelumnya cakupan pemeriksaan deteksi dini IVA hanya 15%, setelah satu tahun pelaksanaan inovasi, cakupan pemeriksaan meningkat. Pada tahun 2016 pencapaian target sebesar (53)

DAMPAK PROGRAM MLM IVA SADANIS PUSKESMAS ASKA

SEBELUM

- Tidak ditemukannya secara dini kasus lesi pra kanker leher rahim dan kanker payudara.
- Cakupan deteksi IVA SADANIS 15 %.
- Perilaku individu yang masih menganggap tabu pemeriksaan IVA SADANIS, dan merasa malu untuk melakukannya.
- Hanya petugas kesehatan bergerak dalam promosi pemeriksaan IVA SADANIS.
- Petugas kesehatan yang berperan aktif dalam mencari target sasaran Wanita Usia Subur yang sudah menikah untuk melakukan pemeriksaan IVA SADANIS.
- Adanya anggapan masyarakat bahwa pemeriksaan IVA SADANIS membutuhkan biaya yang mahal.
- Bagi masyarakat kanker leher rahim dan kanker payudara hanya dapat diobati jika ada keluhan.

SESUDAH

- Ditemukan satu kasus pra kanker leher rahim dan kanker payudara.
- Cakupan deteksi IVA SADANIS sebanyak 62 %
- Adanya peningkatan perilaku dimana wanita sudah mau melakukan pemeriksaan deteksi dini IVA SADANIS atas keinginan sendiri.
- Keterlibatan pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan anggota MLM IVA SADANIS dalam promosi pemeriksaan IVA SADANIS.
- Memberdayakan wanita usia subur yang sudah melakukan pemeriksaan IVA SADANIS dan direkrut menjadi agen MLM IVA SADANIS untuk mengajak atau merekrut 2 Wanita Usia Subur lainnya yang belum melakukan pemeriksaan IVA SADANIS.
- Pemeriksaan IVA SADANIS pembiayaannya tidak dibebankan kepada masyarakat karena telah ditanggung oleh BPJS dan Dinas Kesehatan.
- Tumbuhnya *mindset* bahwa pemeriksaan IVA SADANIS merupakan langkah awal untuk pendeteksian kanker leher rahim dan kanker payudara.

15% dan tahun 2017 sebanyak (329) 62%, hal ini melebihi target nasional yaitu sebesar 50%. Ditemukan kasus IVA (+) : 1, dan 7 kasus tumor payudara.

Di Internal Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Puskesmas Aska sudah menjadi percontohan untuk replikasi program sejenis MLM IVA SADANIS agar dapat diterapkan ke Puskesmas lain, ini diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 135 Tahun 2017 tentang pelaksanaan program pemeriksaan IVA SADANIS dengan metode *multilevel marketing* di seluruh Puskesmas. Selain itu Inovasi ini menjadi bagian dari indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025, yaitu angka harapan hidup meningkat, Angka Indeks Kesehatan Masyarakat meningkat dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI).

Melalui inovasi ini terlihat jelas peran serta masyarakat dalam menemukan jejaring baru. Pemahaman wanita usia subur, khususnya agen, tentang pentingnya pemeriksaan dini IVA SADANIS membantu memberikan pemahaman ke orang lain. Pada akhirnya diharapkan akan melahirkan desa yang bebas dari kanker leher rahim dan kanker payudara. Inovasi MLM IVA SADANIS diikutsertakan dalam Sistem Inovasi

Pelayanan Publik (Sinovik) Kemenpan dan Reformasi Birokrasi. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini melalui proses seleksi, *coaching* yang dilakukan tim independen dari GIZ, Yayasan BaKTI, KOMPAK, PKP2A LAN, STIA LAN yang dalam prosesnya bekerja sama dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Ortala) Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Biro Ortala bertindak sebagai *leading* sektor pelayanan publik yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan inovasi pelayanan untuk diikutsertakan pada kompetisi tingkat nasional melalui SINOVIK (Sistem Inovasi Pelayanan Publik).

Tujuan dari kolaborasi pemerintah dan mitra pembangunan dalam kegiatan seleksi dan *coaching* ini salah satunya adalah untuk menguatkan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Bidan Koordinator Puskesmas Aska. Dapat dihubungi melalui email: srirahma781218@gmail.com



Foto : Yan Wemay/Yayasan BaKTI

Berpihak Pada Realitas

Pengalaman Penyusunan Perda Responsif Gender & Inklusif

Oleh **LUSIA PALULUNGAN**

Salah satu tantangan untuk lahirnya kebijakan responsif gender dan inklusif adalah kurang optimalnya sinergi dan kerjasama multipihak, baik secara kelembagaan maupun personal. Padahal undang-undang dan peraturan lainnya telah memberikan mandat kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk membuatnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak kebijakan yang dilahirkan tidak responsif gender bahkan diskriminatif. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menemukan sebanyak 421 kebijakan diskriminatif.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi hal tersebut yaitu perspektif akan hak asasi manusia dan gender serta kapasitas memahami dan menjalankan tugas pokok, hubungan dengan konstituen dan sinergi kelembagaan. Berdasarkan fakta tersebut, BaKTI dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) melakukan penguatan kapasitas anggota parlemen khususnya Anggota Parlemen Perempuan (APP), untuk menerobos kebuntuan dalam rangka terbangunnya hubungan yang



Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan miskin maka dalam Program MAMPU ini, BaKTI membentuk Kelompok Konstituen yang berfungsi sebagai wadah penampung dan menangani keluhan masyarakat.

Penguatan APP

Penelitian yang dilakukan BaKTI di lima provinsi yang menjadi wilayah Program MAMPU menunjukkan bahwa pemahaman dan perspektif anggota DPRD sangat menentukan dalam proses legislasi, pembentukan sebuah kebijakan daerah. Sebagaimana juga diakui oleh Anggota Parlemen Perempuan/Anggota Parlemen Laki-laki yang didampingi bahwa proses legislasi dilakukan tidak partisipatif, inklusif, dan responsif gender.

Pada umumnya, pencarian isu sebagai titik awal dimulainya proses legislasi, dilakukan dengan studi banding ke wilayah yang telah memiliki peraturan daerah (Perda) yang serupa dengan yang akan diusulkan. Begitu pula dengan substansi yang diatur dalam Perda, tidak dibandingkan dengan fakta dan data lapangan yang sesungguhnya. Umumnya data dan fakta lapangan diperoleh dari hasil pengamatan maupun wacana yang berkembang secara umum.

Berdasarkan pengalaman implementasi program, maka penguatan kapasitas melalui pelatihan telah cukup sebagai dasar pemahaman bagi anggota parlemen. Peran BaKTI untuk penguatan anggota parlemen adalah pendampingan melalui mentoring dan TA (*Technical Assistance*) sehingga anggota parlemen memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan kebijakan berdasarkan masalah sehingga kebijakan dapat mengatasi masalah tersebut, mengalokasikan anggaran untuk realisasi dan implementasinya, serta mengawasi proses pelaksanaan program baik melalui SKPD terkait maupun dampaknya dalam masyarakat.

Proses Legislasi Partisipatif & Inklusif

Pengalaman APP/APPL di Kota Ambon, Parepare, Kabupaten Maros, Tana Toraja, dan Belu dalam melahirkan Perda yang responsif gender dan inklusif, dimulai dari kesadaran mengenai realitas di lapangan mengenai kondisi masyarakat khususnya perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya. Berdasarkan kepedulian tersebut maka APP/APL kemudian menggunakan hak legislasinya untuk mengusulkan Perda melalui Hak Inisiatif DPRD.



(Searah jarum jam) Anggota Parlemen Perempuan (APP) yang merupakan inisiator Perda Inisiatif, Leonara E. Farfar, Juliana Pettipeilohy di DPRD Ambon dan Ibu Haeriah Rahman di DPRD Maros.

sinergis, intens, dan efektif antara anggota parlemen sebagai wakil rakyat dan masyarakat sipil sebagai konstituen. Pengembangan kapasitas difokuskan pada penguatan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai legislasi, penganggaran, dan dan pengawasan, dengan menginternalisasikan perspektif gender, inklusif, dan partisipatif.

Dalam rangka mengefektifkan tupoksi DPRD, maka dikembangkan pula pola sinergi dengan *stakeholders* lainnya yaitu pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok masyarakat khususnya kelompok perempuan sebagai konstituen, dan media (lembaga dan jurnalis). Sehingga terbangun sinergi melalui peran kolaboratif untuk menghasilkan kebijakan responsif gender untuk mengatasi persoalan mendasar perempuan.

Kebijakan publik yang responsif gender dan inklusif adalah kebijakan publik yang memihak pada kebutuhan dan kepentingan perempuan. Untuk melahirkan kebijakan publik yang feminis, maka pihak-pihak yang mempunyai otoritas dalam membuat kebijakan harus mempunyai perspektif gender, anak, inklusif dan perspektif lainnya yang sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Upaya mendorong kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak di lima daerah tersebut bukanlah hal baru. Sebelum Program MAMPU BaKTI, telah ada upaya-upaya untuk melahirkan Perda pemberdayaan/perlindungan perempuan dan anak, namun selalu terhenti karena tidak mendapat respon dari DPRD dan eksekutif, juga tidak mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat sipil.

Belajar dari pengalaman yang telah terjadi sebelumnya, untuk tidak mengulang kegagalan yang sama, serta jika kebijakan telah dibuat tidak hanya menjadi dokumen dan arsip pemerintah daerah atau negara, maka BaKTI dan mitranya melakukan beberapa kegiatan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang feminis, dan selanjutnya kebijakan tersebut dapat diimplementasikan.

BaKTI dan mitranya dalam Program MAMPU memperkuat APP atau APL mengenai perspektif gender dan feminis. Semua APP di wilayah program disasar, sedangkan APL hanya untuk individu-individu yang dianggap mempunyai pengaruh dan mendukung perspektif gender dan feminis dalam mendorong kebijakan publik. APL inilah yang disebut sebagai *champion*.

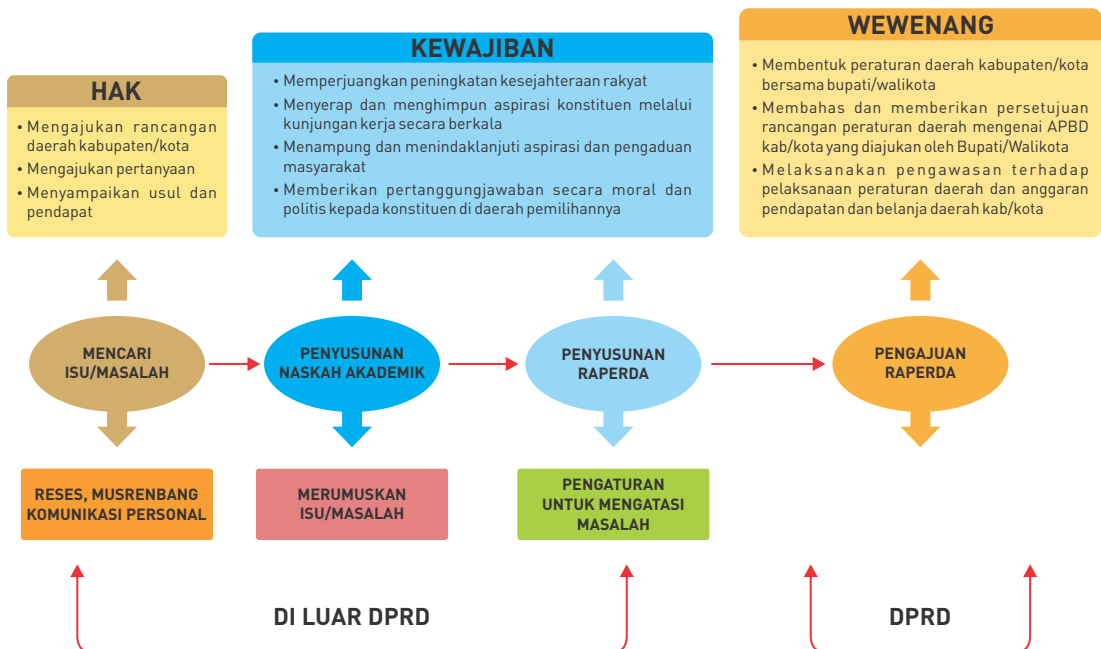
Partisipasi Masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat selama ini belum terbuka untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahannya secara khusus, baik melalui jalur formal yaitu *reses*, *dengar pendapat* atau *hearing*, atau bentuk penyalur aspirasi lainnya berdasarkan ketentuan hukum.

Untuk mengoptimalkan peran partisipasi masyarakat khususnya perempuan miskin maka dalam Program MAMPU ini, BaKTI membentuk Kelompok Konstituen berfungsi sebagai wadah penampung dan menangani keluhan masyarakat, termasuk mendampingi, memberdayakan dan untuk meningkatkan akses perempuan miskin ke program pemerintah. Penguatan komunitas oleh kelompok konstituen berpusat pada penguatan

ALUR PEMBAHASAN LEGISLASI DAN KEBIJAKAN

TUPOKSI DPRD



perempuan miskin di desa/kelurahan terkait dengan penguatan kapasitas untuk penyadaran hak-haknya dan mendorong kepemimpinan perempuan di desa sehingga mampu bersuara, terbukanya akses dan memengaruhi pengambilan kebijakan, termasuk menyuarakan ke DPRD sehingga masyarakat dan perempuan miskin mendapatkan akses dan manfaat dari program-program pemerintah.

Forum Media dibentuk untuk memperbesar suara dan dorongan terhadap kebijakan yang sedang diusung atau permasalahan perempuan dan kemiskinan baik dari komunitas dan kelompok konstituen juga parlemen. Selain itu, Forum Media juga digunakan untuk memberitakan dan mempromosikan hasil kerja yang baik dari pemerintah dan DPRD, memiliki agenda *setting* untuk mengadvokasi kebijakan berdasarkan masalah yang diwacanakan dan melakukan fungsi kontrol untuk mengawal implementasi kebijakan. Isu yang diangkat oleh Forum Media bukanlah isu yang berdiri sendiri. Mitra BaKTI mengambil peran menjadi jembatan untuk menghubungkan komunitas dan DPRD ke media, serta menyediakan informasi tentang isu dan kebijakan yang diusung.

Berdasarkan proses legislasi tersebut, kebijakan dalam bentuk Perda yang didorong APP/APL adalah merupakan implementasi hak inisiatif DPRD dalam membuat Perda. Sudah ada beberapa kebijakan yang telah dihasilkan dari lima kabupaten/kota yang telah didampingi oleh Program MAMPU BaKTI.

Saat ini BaKTI dan mitranya di lima kabupaten/kota sedang mengadvokasi lahirnya peraturan implementasi dari perda tersebut dalam bentuk Peraturan Walikota, Peraturan Bupati (Perbup) dan penganggarannya di APBD. Advokasi ini terus dilakukan hingga memastikan implementasi kebijakan yang responsif gender dan inklusif dalam bentuk perencanaan dan penganggaran responsif gender dapat mengatasi persoalan-persoalan mendasar dalam masyarakat khususnya mengatasi permasalahan yang dialami perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya. Sehingga pembangunan yang berkeadilan gender dan inklusif dapat diwujudkan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Program MAMPU BaKTI dapat menghubungi email info@bakti.or.id

BEBERAPA KEBIJAKAN YANG TELAH DIHASILKAN OLEH LIMA KABUPATEN/KOTA

PERATURAN DAERAH

KAB/KOTA

2015

- Peraturan Daerah Kota Ambon No.10 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV/AIDS Ambon
- Peraturan Daerah Kota Ambon No.12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Ambon
- Peraturan Daerah Kota Parepare No.5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Parepare
- Peraturan Daerah Kota Parepare No.12 Tahun 2015 Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Parepare

2016

- Peraturan Daerah Kota Parepare No.9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare No.12 Tahun 2014 Tentang RPJMD Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor9). Parepare
- Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 8 Tahun 2016 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Belu
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros No.8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Maros
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros No.14 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Maros
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Tana Toraja

2017

- Perda No.8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Keluarga Miskin Kota Ambon Ambon
- Perda No.4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Tana Toraja Tana Toraja
- Perda No.8 Tahun 2017 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kota Maros Maros

2018

- Perda No.1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Maros

Keju Dangke di Langit Enrekang

Oleh **AHMAD ERANI YUSTIKA**



Diolah digital dari foto : Good News From Indonesia

Kabupaten Enrekang dikenal sebagai produsen keju yang sangat populer di Sulawesi Selatan, namanya “Keju Dangke”. Proses pembuatan masih tradisional sehingga belum dibuat secara massal.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan terus mekar sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Dana Desa. Undang-Undang Desa memicu gerakan pembangunan dan Dana Desa mengakselerasi secara lebih kuat lagi.

Gemuruh pembangunan menyebar dengan gegas tanpa harus diteriakkan dengan kencang. Pada aspek pembangunan ekonomi, fokus gerakan ini beralas kepada tiga hal pokok. Pertama, memanfaatkan sebanyak mungkin sumber daya ekonomi yang ada di desa, khususnya sumber daya alam.

Salah satu yang paling penting adalah modal tanah (desa daratan). Tak usah jauh-jauh, kerap kali pekarangan rumah yang lumayan luas di desa dibiarkan tanpa pengelolaan yang memiliki daya guna ekonomi. Padahal bila pekarangan tersebut dimanfaatkan untuk ditanami kebutuhan sehari-hari bakal menyumbang ekonomi rumah tangga yang lumayan.

Kedua, mendorong gerakan ekonomi yang memiliki nilai tambah. Umum terjadi ekonomi di desa hanya bertumpu kepada produksi bahan baku yang kurang memberikan efek terhadap kesejahteraan. Ekonomi hulu semacam ini merupakan keniscayaan yang harus dikerjakan, namun tidak boleh pengolahan dilepaskan kepada pihak lain sehingga kesejahteraan terbang ke pelaku ekonomi di luar desa.

Saat ini desa mesti bisa mengakumulasi kesejahteraan dengan jalan mengaitkan ekonomi hulu-hilir agar langit kesejahteraan dapat digapai. Ketiga, kesadaran warga desa untuk mengurus sumber daya ekonomi secara kolektif. Organisasi ekonomi di desa harus kokoh agar bisa mempertinggi posisi tawar berhadapan dengan pelaku ekonomi lain.

Oleh karena itu, koperasi atau Bumdes juga organisasi sosial-ekonomi lainnya mesti dipromosikan di desa. Organisasi ekonomi tersebut merupakan alat perjuangan bersama yang bakal menggandakan kekuatan ekonomi desa.

Ketiga hal itulah yang saya lihat terjadi di Desa Pinang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Pada 11 Januari 2016 saya ke Enrekang untuk melihat pelaksanaan pembangunan desa, sekaligus evaluasi tahun pertama penggunaan Dana Desa.

Saya agak terkejut karena desa tersebut telah memiliki Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Belum banyak desa yang telah mendirikan Bumdes pada tahun pertama program Dana Desa. Ini tentu saja merupakan impresi awal yang menyenangkan, apalagi dikerjakan oleh sebuah desa dan kabupaten yang letaknya begitu jauh dari Makassar, Ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Desa Pinang, M. Rusli, menerangkan dengan fasih inisiasi pendirian Bumdes tersebut, termasuk cerita dukungan Pemda Enrekang yang begitu besar.

Pak Muslimin Bando, Bupati Enrekang yang menemani saya berkunjung ke desa, berkisah bahwa tiap nilai Rupiah Dana Desa yang dialokasikan untuk membentuk Bumdes, maka jumlah Rupiah yang sama akan diberikan oleh Pemda kepada Bumdes itu. Insentif mulia inilah yang menjadikan Bumdes banyak didirikan di Kabupaten Enrekang sejak tahun pertama program Dana Desa.

Berikutnya, desa ini memiliki warga perempuan yang amat tangguh dan punya literasi ekonomi yang terang. Ibu-ibu PKK terorganisir dengan rapi. Mereka bukan sekadar melakukan rapat, tapi berdiskusi cerdas untuk mengembangkan ekonomi rumah tangga dan desa. Hasilnya? Tak ada sejenkal lahan pun yang tak didayagunakan, termasuk pekarangan rumah.

Lahan di depan dan samping dan belakang rumah, seluruhnya dipakai untuk menanam aneka sayuran dan buah-buahan seperti tomat, cabai, timun, kangkung, jeruk, pepaya, wortel, kacang, dan masih banyak lagi. Desa begitu hijau dan tiap pekarangan rumah tertata rapi.

Kebutuhan sehari-hari untuk memasak tak perlu dibeli di pasar sehingga alokasi belanja dapat dipakai untuk keperluan lain, misalnya biaya pendidikan anak. Masuk ke desa ini kita



Foto: Eko Rusdianto/mongabay.co.id

memperoleh pemandangan yang sepenuhnya menyemburkan keceriaan masa depan.

Desa ini juga dikenal sebagai kawasan peternakan sapi di Kabupaten Enrekang. Sebagian besar rumah tangga memiliki beberapa ekor sapi sebagai tumpuan hidup keluarga. Berita bagusnya, mereka mengelola sapi tersebut dengan cara berkelompok. Para peternak membuat perawatan sapi kolektif yang agak jauh dari rumah warga sehingga dampak dari peternakan tak terlalu mengganggu warga, misalnya bau kotoran.

Bahkan, kotoran sapi tersebut diolah menjadi pupuk kompos untuk kepentingan pertanian. Kotoran padat dan cair seluruhnya diolah sehingga punya nilai ekonomi. Kebutuhan gas dan listrik warga sebagian besar dipasok dari pengelolaan kotoran sapi tersebut. Bumdes di Desa Pinang yang melakukan pengelolaan pupuk dan gas itu. Lagi-lagi keperluan gas yang digunakan untuk memasak dan sumber tenaga listrik dapat dicukupi dari sumber daya yang ada di desa, efisiensi belanja diperoleh kembali.

Saya melihat sendiri ke rumah warga yang

pasokan gas memasaknya disambung dari pipa yang diatur oleh Bumdes. Kebetulan Ibu pemilik rumah tersebut sedang merebus susu segar dari peternakan sapi untuk dijadikan keju. Kabupaten Enrekang dikenal sebagai produsen keju yang sangat populer di Sulawesi Selatan, namanya “Keju Dangeke”. Proses pembuatan masih tradisional sehingga belum bisa dibuat secara massal. Belum tersedia teknologi tepat guna untuk merebus dan memisahkan protein dengan kandungan air yang terdapat dalam susu.

Demikian pula penyaringan dan proses pendinginan seluruhnya dikerjakan dengan peralatan yang sangat sederhana. Proses pencetakan bahkan cuma menggunakan batok kelapa yang dibelah jadi dua dan setelah jadi dibungkus dalam lapisan daun pisang. Bisa jadi seluruh proses bersahaja ini yang membuat lezatnya keju lebih terasa.

Ikhtiar kaum perempuan di Desa Pinang itu tentu patut dipuji meski di tengah berbagai keterbatasan. Lebih dari itu, yang menarik adalah munculnya kesadaran untuk menciptakan nilai



Foto: Eko Rusdianto/mongabay.co.id



Foto: @Khas Enrekang

Dari kiri ke kanan : Proses pembuatan Keju Dangke yang diawali dengan memerah susu sapi lalu dimasukkan ke panci dan direbus bersama sedikit campuran garam ditambah getah pepaya untuk mengerasakan susu kemudian diaduk perlahan. Saat mulai menggumpal, susu diangkat dan didinginkan dalam wadah tempurung kelapa selama 15 menit. Salah satu menu hidangan hasil olahan Keju Dangke.

tambah atas komoditas bahan baku berupa susu sapi yang diproduksi agar nilai ekonominya berlipat. Keju yang nikmat ini, saya mencicipi keju yang langsung dibuat di rumah tersebut, dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi ketimbang dilepas dalam dalam bentuk susu segar.

Rumah tangga memperoleh pendapatan yang berlipat dari praktik nilai tambah ini. Bisa dibayangkan apabila keju itu dikemas dalam wadah dan merek yang menarik, pasti akan lebih tinggi lagi penghasilan yang diterima. Pemasaran juga sangat mudah, bahkan untuk mencukupi permintaan dari Kabupaten Enrekang saja tidak cukup. Praktik hulu-hilir yang benar-benar lengkap telah dipertontonkan di Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Enrekang.

Pencapaian itulah yang membuat desa ini pada 2015 pernah memperoleh juara nasional Adhikarya Pangan Nusantara (APN). Penghargaan yang amat layak diraih karena tiga titik tumpu penting pembangunan ekonomi telah dieksekusi dengan solid: pengelolaan sumber daya, peningkatan nilai tambah, dan pelembagaan organisasi ekonomi.

Pemerintah daerah memberikan dukungan penuh untuk penguatan desa, pemerintahan desa tekun mengawal program Dana Desa, dan warga desa punya komitmen penuh menjadi partisipan gerakan. Inisiasi warga merupakan tulang punggung pembangunan desa, sedangkan peran pemerintah mulai dari pusat sampai desa sebagai pemasok sumber daya ekonomi (fiskal) maupun pengetahuan dan afirmasi kebijakan.

Praktik yang terjadi di Kabupaten Enrekang, yang salah satunya terpantul di Desa Pinang ini, merupakan perpaduan kolaborasi yang ideal dari beragam pemangku kepentingan tersebut. Ekonomi tegak menyundul langit di atas Enrekang berkat Keju Dangke.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Staf Khusus Presiden dan Guru Besar FEB Universitas Brawijaya. Artikel ini bersumber dari Geotimes dan dapat dibaca pada link <https://geotimes.co.id/kolom/keju-dangke-di-langit-enrekang/>



Foto : Zabur Karuru/ANTARA FOTO

Banjir Bandang Sentani : **Amuk Mama Robhong Holo**

Oleh **RESTU DIANTINA PUTRI**

*Orang Papua menyebutnya Robhong Holo,
Sang Mama Kehidupan. Sang Mama murka
karena bagian-bagian kehidupannya dilenyapkan.*

Seminggu sebelum banjir bandang, Sentani diguyur hujan deras. Air Sungai Kemiri dan Sereh di lereng Pegunungan Cyclops terlihat keruh.

Didorong rasa curiga, Edward Sembiring, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua, meminta lima personel polisi hutan dinamakan *Smart Patrol Resort* Sentani untuk mengecek kondisi hulu kedua sungai tersebut.

“Dua sungai itu biasanya jernih. Kalau keruh, pasti ada longsor atau aktivitas tidak biasa,” kata Sembiring.

Butuh dua hari bagi kelima personel itu untuk sampai ke hulu. Kecurigaan mereka benar. Ada longsor di bagian hulu Sungai Kemiri.

Longsor itu, menurut Sembiring, menutup aliran sungai sehingga menyebabkan air keruh dan membentuk tanggul alami.

Lantaran saat itu tak memungkinkan membersihkan material longsor, Sembiring meminta tim kembali ke hilir dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Namun, pada Sabtu, 16 Maret, Jayapura diguyur hujan lebat. Langkah tim Balai Konservasi Papua kalah cepat dari cuaca. Hujan ekstrem saat itu menumpahkan 248,5 milimeter per detik selama tujuh jam dari pukul 5 sore waktu setempat.

Diperkirakan, tanggul dari longsor itu jebol karena tak kuasa menahan laju dan besarnya air. Air sungai inilah bersulich banjir bandang, menerjang lima distrik mencakup sembilan kelurahan di kota dan kabupaten Jayapura.

Kampung-kampung di Distrik Depapre, Sentani, Sentani Barat, dan Waibu di bagian selatan serta Distrik Ravenirara di bagian utara pegunungan tergerus arus air dahsyat. Menyeret pohon, batuan dan segala benda berat, menjebol segala penghalang, menimbun permukiman dan jalan, meluapkan Danau Sentani, menyisakan kekalutan di mana-mana, rumah-rumah hancur.

Hingga enam hari terakhir, sedikitnya 102 warga meninggal, dan ada 13 ribu keluarga dari 11 distrik yang terdampak banjir bandang Sentani, menurut rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

‘Tak Cuma Faktor Alam’

Sutopo Purwo Nugroho dari BNPB merilis pernyataan bahwa topografi curam di bagian hulu Pegunungan Cyclops adalah salah satu penyebab banjir bandang. Daerah-daerah terdampak merupakan dataran aluvial, yang secara singkat bak mangkuk raksasa di lereng gunung. Selain itu,

batuan dan kontur tanah di bagian hulu sungai mudah erosi apabila hujan terus-menerus dan deras.

BNPB juga menduga ada kerusakan hutan yang memicu banjir bandang.

Ada perambahan cagar alam oleh 43.030 warga dari 753 kepala keluarga sejak 2003, kata BNPB. Kemudian, ada penggunaan lahan untuk permukiman dan pertanian di daerah tangkapan air seluas 2.415 ha, penebangan pohon untuk pembukaan lahan, perumahan dan kebutuhan kayu, serta ada tambang galian C.

Aiesh Rumbekwan, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Papua, mengatakan dugaan yang sama. Selain faktor alam, menurut Rumbekwan, ada ulah manusia yang mengubah fungsi hutan.

“Ini terlihat dari material banjir bandang yang membawa banyak kayu gelondongan,” kata Rumbekwan, menambahkan dengan mengutip laporan Global Forest Watch tentang hilangnya tutupan lahan di Pegunungan Cyclops selama 17 tahun terakhir.

Edward Sembiring dari Balai Konservasi Papua mengklaim perambahan hutan bukan dari korporasi, melainkan dari peladang berpindah oleh warga setempat.

“Pada saat ke hulu, memang di kiri-kanan sungai beberapa terlihat ladang ubi jalar. Tapi tidak sampai hulu,” klaimnya, menambahkan bahwa hampir mustahil melakukan perambahan hutan di kawasan hulu karena medannya berat dan curam.

Ia menolak ada dugaan pembalakan liar karena tak melihat ada satu pun pohon yang ditebang di hulu Sungai Kemiri. “Misal di Distrik Ravenirara, kalau ada pembalakan, harus lewat laut karena muaranya langsung ke sana, dan itu tidak mungkin.”

Amuk Mama Robhong Holo

Nama Cyclops berasal dari Belanda, negara kolonial yang mengakui kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia di Jawa pada 1940-an tapi baru resmi keluar dari Papua pada 1960-an.

Berasal dari *Cycoon* yang berarti gumpalan-gumpalan awan kecil dan *Op* yang berarti puncak, Cyclops adalah sekawan awan kecil yang mencungul di puncak Jayapura bak kanopi putih yang melayang.

Pegunungan ini membentang dari barat ke timur sepanjang 36-an kilometer, sumber kehidupan bagi manusia yang kini menghuni tiga distrik di Kota Jayapura dan enam distrik di Kabupaten Jayapura, berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik di utara.



Warga melintas di samping jalan yang rusak akibat banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jaya Pura, Papua.

Foto : **Zabur Karuru/ANTARA FOTO**

Masyarakat adat Sentani menyebutnya Robhong Holo atau Dobonsolo, Sang Mama Kehidupan. Dari rahimnya, ia memancarkan 34 sungai, 14 sungai di antaranya mengalir sepanjang musim, sumber utama air bersih penduduk di lereng maupun kaki gunung. Sang Mama adalah rumah bagi 653 spesies langka.

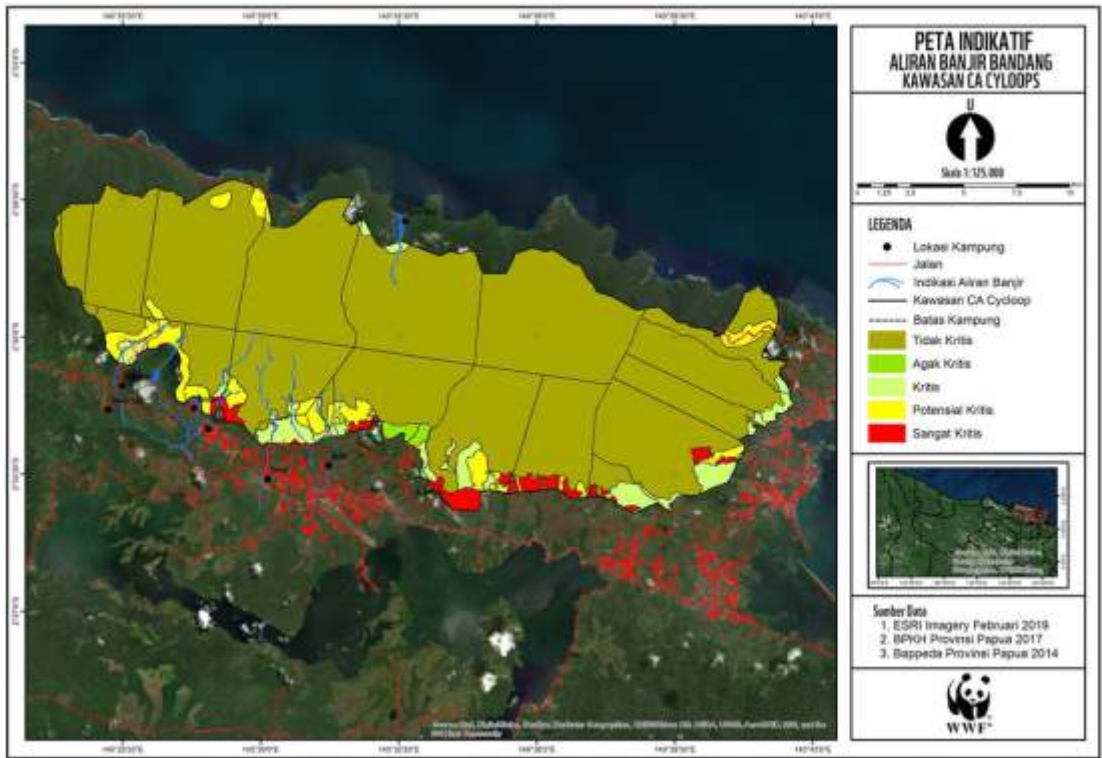
Anggapan umum menyebut Sang Mama Robhong tengah sekarat pelan-pelan lewat pembalakan hutan dan perambahan lahan.

Analisis citra satelit yang dihimpun organisasi lingkungan World Wildlife Fund (WWF) Papua mencatat sekitar 9,5 ribu dari 22 ribu hektar lahan hutan primer di pegunungan Cyclops dalam kondisi kritis, sangat kritis, agak kritis, hingga potensial kritis.

Menurut WWF Papua, lahan sangat kritis berada di hilir wilayah selatan yang berbatasan Danau Sentani. Di dekatnya ada lahan terbuka seluas 2.612 hektare atau 8,2 persen dari total luas lahan Cyclops. Artinya, jika benar ada dugaan pembalakan liar di kawasan hulu, lahan sangat kritis ini seharusnya terlihat di bagian tengah atau puncak Pegunungan Cyclops.

Kendati angka perambahan lahan dan hutan masih kecil, tapi amuk Robhong Holo tak terhindarkan justru ketika ia mulai ditelanjangi dari hilir.





Sumber Foto : WWF Papua

Pada 2007, banjir bandang serupa terjadi di Sentani meski tidak sampai menelan korban jiwa. Dua belas tahun kemudian, banjir yang sama memakan ratusan korban.

Marshall Suebu, aktivis lingkungan Papua serta mantan Ketua Yayasan Hirosi menilai, saat ini sudah banyak permukiman di sekitar daerah penyangga, kawasan di luar cagar alam yang menjaga keseimbangan antara suaka dan kelestarian alam.

Sejak tahun 2000, kaki gunung Rodhong Holo mulai dipadati pendatang dari luar Jayapura. Sentani, sudah menyerupai miniatur Indonesia: para migran ekonomi datang dari pelbagai daerah di Indonesia.

Dari sanalah, ladang-ladang hutan di lereng gunung dibabat demi permukiman serta membiayai kebutuhan hidup keluarga, terutama untuk membiayai pendidikan, ujar Suebu.

Aiesh Rumbekwan dari WALHI Papua menilai koordinasi wewenang wilayah konservasi itu lemah sehingga perambahan dan pendudukan semakin meluas.

Edward Sembiring, notabene berwenang menjaga kesuburan Mama Robhong Holo, mengklaim sudah merekomendasikan bahwa kawasan penyangga adalah lahan kritis buat permukiman.

Sembiring berkata para polisi hutan dan tim Balai Konservasi Papua terus mencari solusi yang pas untuk mengatasi perambahan liar di lereng Pegunungan Cyclops sejak perusakan fungsi hutan mulai ditengarai pada 2003.

“Karena perambahan lahan bukan semata-mata penyebab banjir bandang,” kata Sembiring.

Sementara di Jakarta, pusat kekuasaan dan bisnis Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk sebuah tim tugas untuk mempelajari penyebab pasti banjir bandang Sentani sejak 19 Maret. Satgas diketuai oleh Saparis Sudaryanto, orang dari Kementerian yang menangani urusan daerah aliran sungai.

Satgas akan melakukan rekonstruksi di daerah hulu sungai di kawasan Pegunungan Cyclops untuk mengetahui gambaran utuh soal penyebab banjir bandang Sentani.

“Saya akan mengumpulkan fakta seakurat mungkin,” janji Sudaryanto.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari tirto.id dan dapat dibaca pada link <https://tirto.id/banjir-bandang-sentani-amuk-mama-robhong-holo-nbsp-dj22>. Editor artikel yang dimuat tirto.id adalah Fahri Salam.

Apa yang Perlu Diketahui Tentang Dasar-Dasar Feminisme

(Bagian 2) Selesai

Oleh **NADYA KARIMA MELATI**



Feminisme sebagai gerakan sosial mempunyai tujuan kesetaraan gender. Gender menjadi alat analisis yang penting untuk melihat posisi dalam struktur sosial di masyarakat. Gender dalam hal ini mencakup ekspresi, identitas dan peran. Mengapa analisis gender dalam gerakan sosial feminis begitu penting? Karena identifikasi gender berguna untuk menentukan peran di masyarakat. Peran-peran ini ada membentuk struktur untuk melanggengkan kekuasaan.

Sementara itu, patriarki muncul sebagai istilah untuk menjelaskan mengapa laki-laki mendominasi peran-peran dan posisi penting dalam masyarakat mulai dari institusi hukum, politik, ekonomi hingga sosial. Feminisme hadir



Ilustrasi : Frans Gosali

untuk mengubahnya, melawan patriarki untuk membuat perempuan dan gender non-maskulin lainnya diakui sebagai manusia seutuhnya.

Hal yang harus diutamakan dalam feminisme adalah sifatnya yang non-kompetitif, artinya bukan persaingan melainkan kolaborasi dalam sebuah masyarakat yang adil gender. Miskonsepsi yang sering dituduhkan terhadap feminisme adalah upaya untuk membuat laki-laki sebagai musuh untuk dikalahkan. Feminisme tidak bekerja dalam kerangka persaingan, karena yang menjadi tujuan feminisme adalah perempuan, laki-laki, dan gender lainnya hidup berdampingan dengan adil dan setara.

Feminisme dari Barat?

Ada hal-hal yang menyebabkan feminisme dianggap Barat dan asing dalam gerakan sosial dan ideologi di Indonesia. Pertama, ideologi feminisme tidak integral dalam sejarah Indonesia. Historiografi feminis belum ada karena yang ada hanya sejarah tentang perempuan maskulin pemenang perang. Kedua, para ahli kurang mengutip tokoh-tokoh feminis di Indonesia. Ini menimbulkan ilusi bahwa feminisme memang sesuatu yang berasal dari luar. Ketiga, politik yang berkembang telah “membunuh” gerakan perempuan progresif dan menjadikan gerakan perempuan terjatuh dalam kerangka sosial daripada sosial-politik.

Feminisme adalah bagian dari sejarah kemerdekaan dan revolusi Indonesia. Kata feminisme memang kurang populer pada masa awal perjuangan kemerdekaan karena adanya tuntutan untuk menjadi nasionalis dan pribumi dengan menolak hal-hal yang berbau Barat seperti Marxisme, yang diadaptasi oleh Soekarno menjadi Marhaenisme dan feminisme menjadi emansipasi. Tapi pada prinsipnya sama, yaitu kesetaraan bagi para perempuan di wilayah Hindia Belanda yang bergerak menjadi Indonesia.

Pada masa zaman pergerakan pada tahun 1920-an, gerakan politik dicurigai sedangkan pergerakan menuju kemerdekaan harus jalan terus. Kongres Perempuan Pertama pada 22 Desember 1928 dianggap 'aman' oleh Belanda karena membicarakan isu-isu sosial. Padahal di balik isu poligami, pernikahan dini, dan pendidikan terhadap perempuan adalah tujuan kemerdekaan nasional. Di sinilah letak *personal is political*. Hal-hal seperti poligami, pendidikan untuk perempuan yang dianggap sosial dilihat sebagai sesuatu yang sebenarnya politis.

Kelas sosial berperan penting dalam mengisahkan perjalanan gerakan sosial perempuan Indonesia. Kelas priayi di Jawa paling sedikit ruang gerak, tidak sebebaskan perempuan dari kelas menengah dan bawah. Perempuan-perempuan kelas menengah bisa mempunyai kemandirian ekonomi dan punya nilai tawar lebih tinggi. Kelas menengah terdidik juga menjadi kunci dalam pergerakan perempuan seperti memberantas buta huruf, mendorong keterwakilan dan hak pilih dalam dewan kota, menjadi jurnalis, membuka sekolah sampai membuat partai politik.

Gerakan-gerakan feminis di Indonesia sejak awal sudah muncul beragam dan saling melengkapi, mulai dari gerakan perempuan Islam Aisyiyah dari Muhammadiyah, Perhimpunan Istri Sedar, Wanita Katolik, Wanita Taman Siswa, dan lain-lainnya. Kelas menengah terdidik ini mendorong perempuan untuk bersatu dan aktif secara politik dalam berbagai organisasi. Selama revolusi organisasi perempuan menjadi penolong penting mulai dari menjadi menteri, mengorganisir Palang Merah, sekolah, program kesehatan, hingga kegiatan ekonomi arisan yang menyelamatkan kondisi keuangan di masa paceklik penjajahan Jepang. Tapi segera setelah situasi dapat terkendali gerakan perempuan dipaksa 'mundur' karena dilihat sebagai pesaing

dalam pandangan lelaki. Sebab, gerakan perempuan mampu mengurus persoalan personal menjadi politis dan publik.

Arah dan Isu Gerakan Feminis Indonesia

Dalam konteks *personal is political*, isu-isu yang dianggap pribadi seperti perkawinan dibahas menjadi isu yang politis. Setelah masa revolusi, gerakan perempuan terbagi dua, yakni gerakan politis praktis dan gerakan sosial-politik. Kelas amat memengaruhi perbedaan isu dari tiap-tiap organisasi. Organisasi perempuan dalam politik praktis ramai pada masa revolusi hingga sebelum Orde Baru berkuasa.

Gerakan politik praktis menggunakan pendekatan perempuan sebagai konstruksi sosial sehingga mereka masuk dalam sayap-sayap partai bahkan membuat partai perempuan sendiri. Sedangkan organisasi sosial-politik banyak menggunakan pendekatan perempuan sebagai ibu dan kemampuan reproduksi sosial mereka dalam masyarakat sehingga kualitas perempuan perlu ditingkatkan. Tema perkawinan sangat lekat dalam aliran organisasi perempuan ini. Perjuangan mendapatkan peraturan untuk perkawinan dilakukan sejak masa Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dalam Kongres Wanita Indonesia yang diselenggarakan di Palembang tahun 1955 hingga masa seterusnya.

isu perkawinan sentral dalam gerakan perempuan aliran sosial-politik sebab erat kaitannya dalam pembagian harta yang diatur melalui pernikahan dan sistem kekerabatan. Setidaknya ada tiga isu utama perkawinan, yakni poligami, pernikahan anak, dan pendidikan untuk perempuan. Poligami ditentang karena membuat tidak jelas alur antara pembagian harta yang secara budaya dipegang oleh istri (seperti di wilayah Sumatra dan Sulawesi) dan merendahkan martabat perempuan. Menentang poligami juga menjadi upaya modernisasi karena sistem pernikahan masih diatur oleh adat dan keluarga, sehingga suami bisa mengambil istri lain dan menimbulkan sejumlah permasalahan lainnya.

Pernikahan anak juga penting dibahas karena pernikahan anak membuat perempuan berhenti mendapatkan pendidikan, sedangkan pendidikan kejuruan atau sekolah khusus perempuan bukanlah dalam bentuk sekolah keterampilan. Sekolah disini bermaksud untuk memberantas buta huruf dan sekolah lanjutan perguruan tinggi seperti kedokteran, guru, hukum, sastra dan keperawatan.

Sementara itu, isu gerakan politik praktis dimulai dari hak dipilih dan memilih sebagai

warga negara Hindia Belanda (*Volksraad*) dan tuntutan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, isunya berubah menjadi Partai Wanita Rakyat yang diinisiasi oleh Nyi Sri Mangunsarkoro dan mengikuti pemilihan umum pada tahun 1951 dan 1955 walaupun kalah di kedua pemilu tersebut. Pada tahun 1953, Partai Wanita Rakyat memiliki delapan cabang yaitu di Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, Belitung, Bangka, Medan dan Makassar, dengan jumlah anggota keseluruhan 3.050 orang.

Selain itu, isu ketenagakerjaan menjadi kepedulian gerakan perempuan di politik-praktis. SK Trimurti adalah menteri pertama yang mengurus perburuhan dan menginisiasi cuti haid dua hari dalam sebulan. Isu ketenagakerjaan penting karena dengan perempuan bekerja dia memiliki daya tawar ekonomi dalam keluarga dan perempuan mengurus ekonomi bukan hal yang asing dalam budaya dan sejarah Indonesia.

Melompat ke masa Orde Baru gerakan perempuan politik-praktis dibabat habis dan organisasi perempuan dikerdilkan menjadi satu alur dengan ideologi gender ibuisme yakni perempuan sebagai alat reproduksi sosial melalui organisasi Dharma Wanita dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dalam periode ini, muncul CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) yang memulai babak baru dalam sejarah pergerakan perempuan. CEDAW memberikan kesempatan dan landasan hukum perempuan dengan hak asasinya yang berbeda dengan laki-laki.

Organisasi-organisasi perempuan baru mulai bermunculan dan mengangkat isu tentang seksualitas dan penghapusan kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Lahir pada 1985, Kalyanamitra adalah organisasi pertama yang berdiri mandiri dan mengusung isu tersebut, disusul dengan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kekerasan terhadap perempuan mencapai puncaknya dengan berdirinya Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 1998 sebagai respons atas perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa.

Setelah tahun 2010, gerakan feminis memperluas definisi tentang gender perempuan dan mulai memasukkan identitas gender non-maskulin dan isu seksualitas. Komnas Perempuan adalah organisasi yang paling maju dalam mendefinisikan perempuan karena tidak terbatas pada kategori biologis tapi juga sosiologis.

Begitu juga kemunculan gerakan feminis muda di akar rumput seperti gerakan transgender perempuan atau transnpuan dalam SWARA (Sanggar Waria Muda) dan SGRC (*Support Group and Resource Center on Sexuality Studies*).

Analisis Feminisme dalam Kebijakan

Feminisme sebagai gerakan sosial mempunyai tujuan kesetaraan dengan prinsip kolaborasi. Untuk itu dibutuhkan paradigma yang benar-benar baru dari feminisme. Kebijakan responsif gender tidak sekedar memasukkan kata perempuan, melainkan ada cara pandang baru dan menyeluruh dengan tujuan keadilan.

Pengalaman perempuan menjadi metode untuk mengetahui. Alih-alih sebagai disiplin ilmu, analisis feminis menjadikan feminisme sebagai metodologi. Feminisme adalah cara pandang yang bisa digunakan ke dalam semua bidang, institusi, dan keilmuan, namun terlebih dahulu feminisme membedah apa yang disebut pengetahuan, cara mengetahui, prinsip, dan tujuan. Epistemologi feminisme menekankan pengalaman perempuan sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya empiris dan subjektif karena feminisme berusaha membongkar relasi antara peneliti dan objek yang meneliti. Pengetahuan feminis membongkar standar-standar dalam mengetahui dan menggunakan metode baru untuk melacak ketidakadilan di masyarakat seperti adanya relasi kuasa, bias androsentris, dan dominasi patriarki dalam penelitian dan kebijakan.

Epistemologi feminis sulit diterima oleh masyarakat kebanyakan karena harus memahami perspektif dan prinsip feminisme sebagai ilmu pengetahuan. Apalagi ilmu pengetahuan di Indonesia terjebak dalam arus paradigma positivistik, objektif dan rasional justru dengan menganggap semua manusia sama tanpa mengindahkan identitas gender dan kelas sosial yang berbeda antar setiap manusia menjadikan itu bias dan hal tersebut yang ditentang dalam analisis feminis.

Feminisme interseksional sangat membantu dalam analisis feminisme dalam kebijakan karena sebuah kebijakan yang dibuat sering kali bias gender akibat pembuat dan peneliti tidak memasukkan gender sebagai alat analisis. Kompleksitas pengalaman perempuan tidak bisa dilepaskan dalam menggunakan analisis feminis. Setiap pengalaman perempuan tidak bisa dibandingkan karena perbedaan konteks yang melingkupinya. Seorang perempuan berjilbab di Amerika Serikat dengan perempuan berjilbab di Jakarta akan mengalami penindasan berbeda dan

cara analisis yang juga berbeda. Oleh sebab itu dibutuhkan teori feminis yang beragam untuk membahas dan menganalisis sebuah konteks sosial.

Capaian-capaian Gerakan Feminis Indonesia

Pada 2019 ini gerakan feminis/emansipasi perempuan di Indonesia memasuki babak ke-100 tahun terhitung dari masa politik etis Hindia Belanda dan zaman pergerakan kemerdekaan Indonesia. Beberapa organisasi feminis telah memberikan kontribusinya dalam pemajuan kualitas hidup yang adil gender hal tersebut, di antaranya adalah :

- Kongres Perempuan Pertama Indonesia 1928;
- Hak pilih dan dipilih perempuan dalam Dewan Kota (*Volksraad*) dan Pemilu pertama Indonesia tahun 1955;
- Kemerdekaan Indonesia 1945 dan pengakuan negara berdaulat oleh Belanda 1949;
- Pendirian Pusat Keluarga Berencana sebagai organisasi perempuan berdaulat atas organ reproduksinya, pada 1975;
- Undang-undang Perkawinan 1974;
- UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebut tentang cuti haid perempuan;
- UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pendirian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di seluruh kota/provinsi;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Capaian-capaian ini belum selesai karena masih banyak pekerjaan rumah bagi gerakan feminis di Indonesia. Kondisi perempuan yang beragam dan masing-masing masih harus berusaha menganalisis posisinya dan menciptakan feminismenya masing-masing. Salam pergerakan perempuan!

INFORMASI LEBIH LANJUT

Nadya adalah penulis dan peneliti sejarah dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) Indonesia. Artikel ini bersumber dari [Magdalene.co](https://magdalene.co) adalah sebuah media online yang mengangkat artikel-artikel yang menawarkan perspektif segar di luar batasan gender dan budaya yang ada. Artikel ini dapat dibaca pada link <https://magdalene.co/story/yang-perlu-diketahui-tentang-dasar-dasar-feminisme>

Oleh **YUNI BAUN**

Akalbilan Primadona Hambar

Datang dari latar belakang pendidikan sebagai seorang pendidik membuat saya tidak pernah memberi perhatian lebih pada pangan. Saya selalu makan apa yang tersedia di meja makan atau mengolah makanan yang tersedia di rumah tanpa pernah memedulikan banyak hal di balik tersedianya apa yang saya makan setiap harinya.

Pertanyaan seperti pernahkah kamu mendoakan orang yang mengusahakan beras yang kamu makan hari ini, atau coba bayangkan apa jadinya pasar tanpa mereka yang mengusahakan bahan makanan? Tentu saja saya terhenyak, rasanya seperti minum kopi disiang bolong tanpa disadari.

Malu benar mengetahui bahwa saya tergolong dalam kumpulan orang-orang yang acuh tak acuh bahkan tak peduli tentang pangan padahal siapapun kita dengan profesi apapun dan latar belakang pendidikan apapun mengonsumsi bahan makanan untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

Dalam benak saya secara pribadi, menghargai usaha dan jasa mereka para penyedia pangan adalah sebatas membeli tanpa menawar atau menghabiskan makanan dipiring dan tidak membuangnya. Di balik mudahnya akses mendapatkan semua bahan makanan yang kita butuhkan terdapat hal-hal serius yang sudah seharusnya menjadi perhatian bahkan tugas dan tanggung jawab kita untuk tidak mengabaikannya atau menutup mata dan pura-pura tidak tahu.



Kiri : Potongan Akalbilan yang sedang dijemur. Kanan : Pohon Gewart (*Corypha Gebanga*). Foto : **Yuni Baun**

Sebuah survei yang dirilis baru-baru ini menunjukkan masyarakat Indonesia mulai lebih peduli makanan yang mereka konsumsi. Bahkan sebagian besar responden mengaku mengikuti pola diet tertentu. Survei tersebut dilakukan oleh *Nielsen's New Global Health and Ingredient-sentiment* dan dipublikasikan (6/9) lalu. Survei ini menilik berbagai perilaku konsumsi yang kemudian diklaim oleh responden. “Konsumen kini lebih sadar akan pola makan sehat, karena itu mereka ingin menerapkan pola makan yang dapat mengatasi masalah kesehatan”, kata Yudi Suryanata, Direktur Eksekutif Nielsen dalam rilis yang diterima.

Menyisakan makanan di piring karena kenyamanan atau tidak memakan yang sudah saya ambil di piring atas nama selera selama ini adalah hal yang biasa bagi saya. Tanpa saya sadari beberapa orang tak beruntung diluar sana menginginkan apa yang saya buang atau apa yang tak saya inginkan. Karena kita tidak tahu betapa berharganya apa yang kita punya dan posisi kita ada sebagaimana adanya sehingga kita jarang mensyukuri apa yang kita punya.

Jaman SD dulu ketika makan, kami selalu dinasihati mama, katanya “berkat selalu ada pada biji terakhir dipiringmu”. Semakin kesini saya lalu memahaminya bahwa mama menggunakan pendekatan dengan bahasa sederhana untuk anak

seusiaku pada saat itu dan membuatku memahami bahwa tidaklah baik menyisakan makanan di piring.

Ketika bergabung dalam perbincangan ringan bersama komunitas PIKUL di kegiatan KEJAR PALOK kemarin, wawasan saya tentang pangan diperbarui bahkan bertambah banyak. Pengetahuan tentang pangan, pangan lokal, kedaulatan pangan dan keberagaman pangan adalah topik yang kami pelajari dari kegiatan tersebut. Pada akhir kegiatan sesuai agenda, beberapa orang akan dipilih berdasarkan kriteria panitia untuk mendapatkan beasiswa dan belajar langsung ke beberapa desa yang telah bermitra dengan komunitas PIKUL.

Saya adalah salah satu dari lima orang yang mendapatkan kesempatan berharga itu. Saya dan dua orang rekan ditempatkan di desa Lorotulus di Kabupaten Malaka. Perjalanan kami dari Kupang pada 12 Februari 2018 dimulai dari jam 06.30 dan tiba di desa pada pukul 15.30 WITA. Perjalanan kami sangat melelahkan namun tak memadamkan semangat dalam menjalankan misi kami.

Desa Lorotulus adalah desa yang terletak paling barat di Kabupaten Malaka dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan, didominasi oleh suku Suhi, suku Soka dan ada juga orang-orang pendatang dengan ciri dan karakter fisik yang bisa langsung dibedakan dari penduduk lokal. Bahasa Tetun adalah bahasa yang paling digunakan di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu.

Di hari yang sama, kami bertemu seorang perempuan paruh baya bernama mama Hana yang mengusahakan pangan lokal sebagai mata pencahariannya (pembuat Akalbilan). Banyak pangan lokal yang kami temui disini diantaranya Akalbilan (sagu dari pohon gewart), beras, jagung, sorgum, ikan, berbagai jenis sayuran dan ubi. Beberapa diantaranya ditanam warga di kebunnya sehingga kita bisa menemukan sayuran segar yang baru dipetik untuk dikonsumsi atau dijual. Pangan lokal lain seperti beras, ikan, kerang dan udang biasanya datang dari luar desa.

Saat menyusuri pasar tradisional, kami menemukan banyak penjual Akalbilan yang berjejer mulai dari membuat, menyajikan dan menjualnya langsung kepada pembeli. Kami sempat bertanya apakah semua yang mereka buat hari ini akan laris terjual mengingat jumlah mereka yang cukup banyak, mereka bilang tidak masalah karena waktu pasar yang relatif lama sampai pukul 16.00 sehingga para pembeli tetap ada.



Kiri - Kanan : Proses pembuatan tepung sago, potongan Akalbilan yang sudah kering ditumbuk/digiling. Mengaduk tepung Akalbilan yang telah dicampur air dalam sebuah baskom. Babilan (wadah berbentuk piring) yang digunakan untuk memanggang tepung. Hasil olahan tepung Akalbilan yang siap dikonsumsi. Foto : **Yuni Baun**

Akalbilan sendiri adalah sebutan penduduk lokal untuk jenis makanan yang berasal dari tepung sago dari pohon gewang. Pohon gewang tumbuh subur secara liar dan tidak ditanam warga.

Untuk membuat Akalbilan pertama-tama pohon gewang atau akal sebutan penduduk setempat untuk pohon gewang yang sudah tua tinggi sekitar 8 meter atau lebih, berdiameter satu meter, memiliki daun yang sehat dan tidak terserang hama, atau saat sudah memiliki buah ditebang, lalu dipisahkan dari kulitnya. Penduduk setempat masih melakukannya dengan manual menggunakan parang atau kapak.

Setelah isi dalam atau inti pohon akal dipotong keci-keci lalu dijemur sampai kering dan tidak ada kandungan airnya. Proses ini biasanya berlangsung selama dua hari jika cuaca sedang tidak hujan dan jika cuacanya tidak terlalu baik maka proses penjemuran bisa berlangsung sampai empat atau lima hari. Setelah benar-benar kering potongan akal itu lalu ditumbuk atau digiling menggunakan mesin penggiling. Jika ditumbuk menggunakan *Alu*, alat penumbuk berupa kayu dengan panjang sekitar 2 meter dan berdiameter 5 sentimeter, dan *Ahuk*, media tumbuk yang terbuat dari kayu sepanjang 2 meter yang dilubangi sehingga menyerupai sampan.

Hasil tumbukan yang telah halus ini kemudian diayak menggunakan *wawalin*, pengayak tradisional dari anyaman tulang daun gewang berbentuk persegi 4 berukuran 50 x 50 centimeter untuk memisahkan tepung sago dari ampas potongan serat yang tidak boleh disatukan.

Jika ampasnya dirasa masih banyak mengandung tepung, proses menumbuk dapat diulang lagi. Tepung yang diayak ini lagi disaring

lagi di dalam karung menggunakan karung untuk menghindari tepung bertebaran di mana-mana dan jangan sampai dihirup. Penyaringan kedua ini menggunakan kain yang diikat kedua ujungnya, dipegang oleh kedua tangan lalu digoyangkan di dalam karung sehingga tepung halus akan keluar melalui serat kain. Ampas kedua ini oleh penduduk setempat dijadikan sebagai pakan ternak atau jika ada orang yang mencarinya biasanya dihargai dengan harga 35 ribu rupiah sampai dengan 40 ribu rupiah perkarungnya, disisi lain dapat juga digunakan sebagai media tumbuhnya jamur oleh sebagian pengusaha jamur.

Tepung hasil saringan ini kemudian dimasukkan ke dalam baskom dan dicampurkan air lalu diremas menggunakan air seperti ketika kita hendak membuat roti. Setelah itu diratakan dan diisi air sampai baskomnya penuh dan mulai diaduk menggunakan *Leleaka* atau anyaman dari tulang daun pohon gewang berbentuk seperti tabung labu erlenmeyer.

Pengadukan ini berlangsung selama dua jam dan cara mengaduknya pun hanya dibagian atasnya saja sehingga bagian bawahnya terbentuk lapisan endapan sari tepung. Jika dirasa sudah cukup tebal, banyak lalu dibuang airnya. Proses pembuangan air ini menggunakan gayung untuk menimba dan meninggalkan endapannya. Endapan itu lalu dihancurkan dan ditambahkan air dan didiamkan. Setelah 5 menit airnya lalu dibuang dan yang tersisa adalah lapisan sago berwarna putih.

Sagu ini belum kering benar dan masih mengandung air yang cukup banyak, untuk mengeringkannya dedak/ampas dari penyaringan kedua ditaruh di atasnya lalu ditekan-tekan sehingga air yang masih di dalam sago akan

diserap oleh dedak tersebut. Proses ini akan diulang sampai lima kali hingga tersisa lempengan sagu yang lembab dan biasanya disebut kakumuk. Lempengan sagu ini yang kemudian siap digunakan untuk membuat Akalbilan. Jika dikeringkan dapat diolah untuk membuat ameka kue modern setelah ditambahkan tepung terigu. Cara mengambil lempengan sagu ini untuk membuat Akalbilan adalah dengan diserut seperti yang biasa dilakukan para penjual es krim menggunakan sendok.

Untuk membuat Akalbilan, tepung sagu dicampurkan dengan parutan kelapa dan kacang hijau yang telah dimasak. Campuran ini lalu diratakan menggunakan tangan diatas babilan (lempengan tanah liat berbentuk seperti piring) yang telah dipanaskan diatas api.

Ada dua lempeng babilan yang digunakan (jika lempengan pertama sudah matang lalu dipindahkan ke bagian atasnya). Babilan pertama ditaruh diatas api dan ditindis babilan kedua, jika babilan pertama sudah matang Akalbilannya lalu dikeluarkan dan lempengan babilan kedua dipindahkan ke bawah. Proses ini akan diulang sampai seluruh campuran Akalbilan yang sudah dicampur habis.

Bagi kebanyakan orang Malaka, Akalbilan itu enak dinikmati selagi hangat meski jujur saja rasanya hambar ketika saya dan dua teman mencicipinya untuk pertama kalinya. Menjual Akalbilan menjadi motor ekonomi yang meningkatkan penghasilan sebagian besar mama-mama di Wanibesak, ini dapat kita lihat langsung dari kebanyakan orang yang berderet menjual Akalbilan pada hari-hari pasar tradisional yang telah disepakati seperti di pasar Wanibesak, pasar Besikama, pasar Webriamata, dan pasar Hanimasin yang kami kunjungi. Selain mengusahakan Akalbilan, mereka juga hidup dari hasil bertani dengan mengusahakan lahan kering yang ditanami berbagai jenis pangan lokal. Dengan curah hujan yang cukup mereka menanam tiga kali setahun dan kebanyakan menanam tanaman beumur tiga bulan.

Ketika ditanya seberapa sering mereka mengonsumsi Akalbilan, kebanyakan mereka mengatakan sering sekali selama persediaan tepung akal ada di dapur. Selain Akalbilan mereka juga mengonsumsi jagung, beras, ubi-ubian, sorgum dan beberapa jenis makanan kalengan dalam kemasan sebagai kudapan (biskuit, minuman kaleng dan susu).

Menurut pengakuan sebagian orang penghasilan dari Akalbilan sebagai kegiatan ekonomi selain sebagai sumber ekonomi, mereka

juga dapat menyekolahkan anak-anak mereka. Akalbilan yang dijual memiliki nilai lebih dibandingkan jika dijual dalam keadaan mentah dalam satuan kakumuk dan masih berupa gumpalan sagu padat.

Saat pertama kali datang saya tidak pernah membayangkan akan seperti apa rasanya, sebab ditempat saya pohon akal digunakan sebagai pakan ternak seperti babi dan sapi. Ketika sampai di Malaka, akal nyatanya menjadi sesuatu yang bernilai lebih bahkan dianggap sebagai penyelamat dulunya saat gagal panen atau masa paceklik pangan terjadi. Tumbuh dengan liar dan tidak butuh perawatan khusus oleh warga, namun siap dipanen kapanpun jika sudah cukup umur. Kini saat penduduk Malaka telah terselamatkan dari paceklik pangan, akal tetap dikonsumsi sebagai camilan atau pengganti nasi dan jagung jika mereka bosan dan hendak mengganti menu makanan mereka sesekali. Selama mereka mau dan rajin akal tetap bisa dikonsumsi mengingat mereka juga berkebun dan tidak sepenuhnya bergantung pada akal sebagai pangan pokok.

Terlepas dari akalbilan yang kami pelajari dan lihat disana, kami menemukan sebuah fakta menarik yang tak bisa diacuhkan begitu saja bahwa disana banyak manula yang hidup diatas usia 100 tahun. Mencengangkan bukan? Saya pernah bertemu beberapa orang tua di usia 70 tahun tapi tak sekuat mereka yang saya lihat di kampung kemarin. Dalam pandangan saya, aktifitas fisik dan hidup di tempat yang jauh dari polusi dan radikal bebas adalah beberapa penyebabnya disamping pola makan yang tidak banyak mengandung pengawet maupun bahan kimia tambahan. Mereka berkebun dan mengonsumsi makanan yang jauh dari pestisida sebab bahan makanan sehat itu diambil langsung dari kebun mereka. Mereka juga menjaga keharmonisan hubungan antara manusia, alam, budaya dan adat istiadat yang masih kental sampai sekarang.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Yuni Baun (Peserta Magang Program KEJAR PALOK (Ketong Anak Muda Belajar Pangan Lokal), Proyek Keberagaman Pangan untuk Kedaulatan Pangan, PIKUL - OXFAM, Desember 2017 - Februari 2018). Sumber: <https://www.perkumpulanpikul.org/2018/08/20/akalbilan-primadona-hambar/>



Foto : Dok. Program MELAYANI - Yayasan BaKTI

MELAYANI, Solusi Layanan Dasar di Indonesia

Oleh **AFRIZAL ABDUL RASYID**

Setelah bekerja selama 16 bulan di tiga kabupaten mitra yaitu Bojonegoro di Jawa Timur, Belu di NTT, dan Kubu Raya di Kalimantan Barat. Masing-masing Kabupaten mitra mengidentifikasi dan memilih “masalah”, dalam proses pencarian dan implementasi solusinya difasilitasi oleh pendamping dari MELAYANI. MELAYANI (Mengurai Permasalahan Perbaikan Layanan Dasar di Indonesia) adalah sebuah program yang mendukung pemerintah daerah untuk menggunakan pendekatan berbasis masalah-masalah layanan dasar dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah sendiri. Kegiatan ini mendukung Pemda untuk menggunakan pendekatan berbasis isu/masalah untuk mengatasi

masalah layanan dasar. Metodologinya diambil dari beberapa studi dan pembelajaran mengenai reformasi layanan publik seperti *Problem Driven Iterative Adaptation* (PDIA) yang dikembangkan oleh beberapa professor dari Harvard Kennedy School of Government, dan pilot terdahulu yang dikembangkan oleh Bank Dunia yang disebut sebagai *Rapid Assessment and Action Plan* (RAAP).

Kabupaten Bojonegoro memilih masalah penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir sebagai fokus masalahnya, Kabupaten Belu memilih masalah peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di tingkat Sekolah Dasar, dan Kabupaten Kubu Raya memilih masalah penurunan angka *stunting*. Di akhir Februari (25/2) bertempat di Hotel Mercure Jakarta MELAYANI melaksanakan Lokakarya Akhir bertujuan untuk berbagi pengalaman dalam

mengimplementasikan MELAYANI: Perspektif Tim Kerja, Perspektif Eksekutif Daerah dan Diskusi Panel dan kemungkinan integrasi pendekatan “*Adaptive problem solving*” dalam proses kerja pemerintah daerah untuk memecahkan masalah-masalah layanan dasar.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kathy Whimp, *Lead Public Sector Management Specialist*, World Bank Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa tantangan penyelenggaraan pelayanan dasar di Indonesia sangat besar karena wilayah Indonesia sangat luas dan populasinya sangat banyak. “Saat ini tantangan pelayanan dasar itu sangat berubah, bukan lagi membangun jalan atau Puskesmas, tetapi bagaimana kita meningkatkan pelayanan dasar tersebut ke arah yang lebih baik” tambahnya.

Dalam menyelesaikan masalah daerah, solusinya tidak selalu terkait dengan anggaran. Jika pelaksanaan anggaran dikerjakan kurang tepat, maka hasilnya juga tidak akan memperbaiki kondisi daerah. Melalui Program MELAYANI ini kita mencari cara atau metodologi dalam mengidentifikasi dan mengurai persoalan-persoalan yang dihadapi daerah. Kemudian merancang suatu proses untuk menemukan solusi yang tepat. Dalam mengimplimentasi program MELAYANI, diawal melakukan proses identifikasi pemangku kepentingan, menggali lebih lanjut yang menjadi persoalan daerah secara berulang atau disebut *iterative* dan pada akhirnya mencari solusi.

Dalam sesi berbagi pengalaman mengimplimentasikan MELAYANI pada tiga daerah mitra untuk menggali Perspektif Tim Kerja di daerah. Ketiga Tim dari kabupaten mitra MELAYANI dalam paparannya menyampaikan dengan adanya MELAYANI kerjasama lintas sektor lebih baik dan terjadi lebih intens untuk menyelesaikan persoalan-persoalan daerah. Ada juga hal diluar sektor yang selama ini tidak menjadi perhatian pemerintah daerah, namun juga sangat berpengaruh dalam penyelesaian masalah, seperti mutasi staf atau pejabat, keterlibatan instansi diluar isu sektor yang sedang ditangani, seperti penyelenggaraan PAUD, sebelumnya hanya terlibat dinas pendidikan dan dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, namun tidak melibatkan dinas perizinan, ketika dianalisis lebih dalam rupanya perizinan memiliki andil besar dalam pendirian dan penyelenggaraan satu desa satu PAUD.

Pada sesi perspektif eksekutif daerah, Kabupaten Belu membagikan pengalaman Kabupaten Belu menjadikan sektor pendidikan sebagai isu prioritas karena merupakan awal

segalanya, dengan pendidikan yang baik seorang anak bisa menjadi dokter dikemudian hari, dengan pendidikan juga angka kemiskinan dapat ditekan baik di Kabupaten Belu maupun di Indonesia. Pendidikan harus dimulai sejak usia dini. Di Belu banyak masalah terkait pendidikan salah satunya kedisiplinan tenaga pengajar dan pendidik tidak melaksanakan tugas dengan hati. Di Kabupaten Belu diharuskan satu dusun ada satu PAUD, saat ini di Kabupaten Belu terdapat 203 PAUD, pada tahun 2020 target telah ada 404 PAUD. Dalam hal perizinan pendirian PAUD tidak dipersulit, jikapun ada hal yang dianggap sulit dapat melaporkan langsung kepada bupati dan bupati akan membantu. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Belu, dengan hadirnya MELAYANI di Belu mampu melihat bahwa persoalan pendidikan ini bukan persoalan sektoral, namun ini persoalan bersama, persoalan layanan dasar yang harus diselesaikan bersama, sehingga kami memberikan masukan kepada pimpinan agar dapat dikoordinasikan untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Begitu juga dengan tugas guru tidak sekedar mengajar, namun harus melayani siswanya dengan tulus dan ikhlas untuk mempersiapkan anak-anak bangsa ini agar berguna dalam merintis masa depan mereka yang lebih baik, guru juga perlu memetakan potensi siswa, termasuk potensi masalah yang dihadapi siswanya.

Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro, program MELAYANI sangat membantu Pemerintah Bojonegoro dalam mengefektifkan koordinasi antar OPD terkait dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Bojonegoro.

Pemerintah daerah cukup bisa mengidentifikasi masalah di daerahnya, namun siklus kerja pemerintah daerah belum cukup membuka ruang baik di sisi ketersediaan SDM maupun waktu untuk menggali akar masalah dan menemukan solusi yang dapat menjawab permasalahan yang dihadapi daerah. Beberapa Pemda cukup kreatif untuk merancang program lokal, seperti SAGASIH di Bojonegoro, namun masih sering Pemda hanya mengimplementasikan program pusat tanpa adaptasi lokal. Salah satu nilai tambah MELAYANI adalah mendampingi Pemda untuk melakukan analisis sendiri, sehingga Pemda merasa memiliki atas hasil analisis dan solusi dapat lebih sesuai dengan situasi setempat. Analisis yang dilakukan membuka ruang untuk melihat praktik baik yang sudah ada di daerah (*Positive Deviant*). Instansi



sektoral, seperti dinas kesehatan mengalami kesulitan untuk mengatasi kendala keberhasilan program yang berasal dari proses administrasi dan manajemen daerah, seperti sistem mutasi pegawai atau sistem administrasi anggaran, sehingga akhirnya menganggap kendala manajemen sebagai *given*. Pemecahan masalah layanan dasar seringkali memerlukan tim multi-sektoral, mulai dari pimpinan hingga anggota. Idealnya ada instansi di daerah yang dapat berfungsi sebagai integrator.

Form Follow Functions

Banyak data dikumpulkan tetapi lebih untuk keperluan pelaporan keatas dan belum cukup digunakan untuk keperluan memecahkan masalah yang dihadapi. Pengalaman MELAYANI menunjukkan bahwa banyak data yang bisa dimanfaatkan untuk memahami masalah/situasi lokal. Kesulitan untuk bekerja multi-sektoral di tingkat Kabupaten menyebabkan perlunya dorongan dari agen eksternal (dalam kasus MELAYANI, pendamping program), peran ini dapat saja diambil oleh pemerintah pusat atau provinsi.

Dua ide besar untuk aplikasi pendekatan *problem solving* dalam proses kerja pemerintah adalah selain dari mengimplementasikan program vertikal, K/L dan pemerintah provinsi

memobilisasi “Tim Pemecahan Masalah” ke daerah-daerah prioritas dan masukkan proses penguraian masalah/analisa situasi/diagnostik ke dalam siklus kerja tahunan pemerintah daerah, misalnya dalam penyusunan RENJA SKPD.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mendampingi Kabupaten/Kota, sebelumnya telah ada program penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Untuk implimentasi program ini diperkuat oleh Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009. Amanah dari Pergub tersebut semua ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan. Dalam pelaksanaan Pergub ini perlu adanya komitmen baik dari pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam hal penanganan *stunting*, tidak dapat dilakukan sendiri oleh dinas kesehatan karena 70% dari intervensi sensitif tersebut berada pada lintas sektor. Jika kepemimpinan yang kuat baik di level provinsi maupun kabupaten akan mampu menjabarkan masalah-masalah yang mangakibatkan terjadinya *stunting* baik pada sisi intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

Diharapkan daerah mampu melahirkan inovasi-inovasi dan dapat direplikasi untuk daerah-daerah yang lainnya. Untuk mencapai harapan itu perlu dua jalan besar yaitu pertama



MELAYANI mengadakan Lokakarya Akhir yang bertujuan untuk berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan Program MELAYANI: Perspektif Tim Kerja, Perspektif Eksekutif Daerah dan Diskusi Panel dan kemungkinan integrasi pendekatan “*Adaptive problem solving*” dalam proses kerja pemerintah daerah untuk memecahkan masalah-masalah layanan dasar. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kathy Whimp, *Lead Public Sector Management Specialist*, World Bank Jakarta. Foto: **Afrizal Abdul Rasyid/Yayasan BaKTI**

sekali adalah struktur dan kedua kultur. Jika dilihat waktu pendampingan hanya dilakukan selalu satu setengah tahun, untuk melakukan perubahan kultur agak sulit. Faktor *leadership* sangat berpengaruh pada keberlanjutan program, jika kepemimpinannya baik pasti program-program yang baik akan dilanjutkan, begitu juga sebaliknya.

Pada sesi Kemungkinan Integrasi pendekatan *Adaptive problem solving* dalam proses kerja pemerintah daerah untuk memecahkan masalah-masalah layanan dasar. Dalam hal perencanaan daerah, Kementerian Dalam Negeri hanya mengevaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah saat menjadi rancangan Peraturan Daerah (Perda). Khusus untuk provinsi yang melaksanakan Pilkada, Kemendagri meminta kajian teknokratik itu harus sudah dibahas, namun masih terdapat beberapa daerah yang tidak sinkron antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana awal, walaupun diawal telah diminta untuk menyiapkan terlebih dahulu. Salah satu contoh, tingkat kelulusan di suatu provinsi

mencapai 100%, namun ketersediaan atau kualitas guru hanya 80%, seharusnya ada kegiatan untuk peningkatan kapasitas guru atau pengadaan guru, namun kegiatan itu tidak tercantum di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Pendekatan yang dilakukan MELAYANI baiknya dilakukan oleh OPD-OPD di daerah pada saat proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Harapannya metodologi yang diperkenalkan oleh Program MELAYANI dapat diterapkan pada isu lain atau daerah lainnya, sehingga setiap daerah dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik di masa akan datang.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MELAYANI dapat menghubungi email info@bakti.or.id

Kerja Ikhlas di Suator

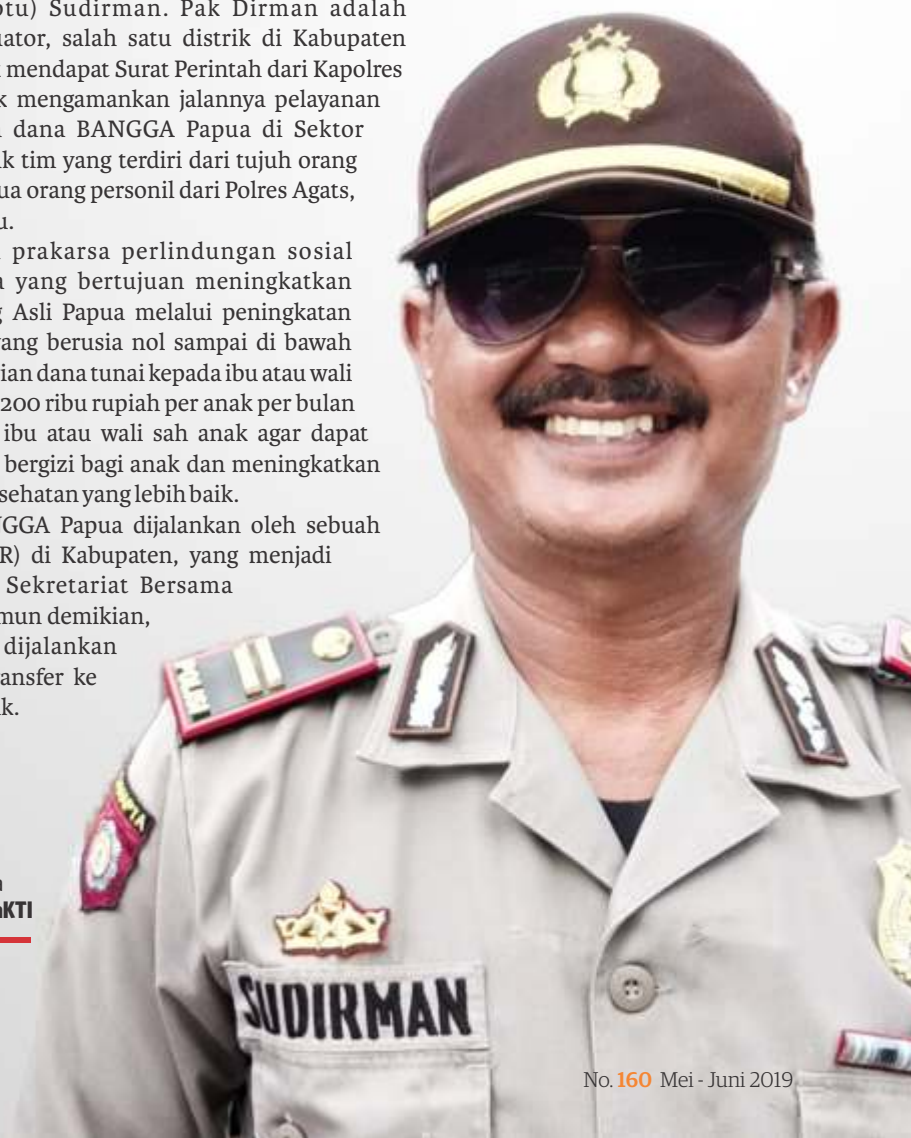
Oleh **LUNA VIDYA, DESY MUTIALIM**
dan **RAHMAN RAMLAN**

Namanya (Iptu) Sudirman. Pak Dirman adalah Kapolsek Suator, salah satu distrik di Kabupaten Asmat. Sejak mendapat Surat Perintah dari Kapolres Asmat untuk mengamankan jalannya pelayanan pembayaran dana BANGGA Papua di Sektor Suator, Sudirman membentuk tim yang terdiri dari tujuh orang anggota ditambah bantuan dua orang personil dari Polres Agats, untuk melakukan tugasnya itu.

BANGGA Papua adalah prakarsa perlindungan sosial Pemerintah Provinsi Papua yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya Orang Asli Papua melalui peningkatan kesehatan anak asli Papua yang berusia nol sampai di bawah empat tahun, melalui pemberian dana tunai kepada ibu atau wali sah anak. Dana tunai sebesar 200 ribu rupiah per anak per bulan diberikan untuk membantu ibu atau wali sah anak agar dapat menyediakan makanan yang bergizi bagi anak dan meningkatkan akses anak kepada layanan kesehatan yang lebih baik.

Tata kelola Program BANGGA Papua dijalankan oleh sebuah Sekretariat Bersama (SEKBER) di Kabupaten, yang menjadi perpanjangan tangan dari Sekretariat Bersama BANGGA Papua Provinsi. Namun demikian, layanan pembayaran dana dijalankan oleh Bank Papua, melalui transfer ke rekening ibu atau wali sah anak.

Pak Sudirman (kiri), Mama Bernadetta (kanan). Foto: **Syaifullah/Yayasan BaKTI**



Sejak bulan Desember 2018, Program BANGGA Papua telah memasuki tahap pembayaran dana, di tiga Kabupaten Pilot Prakarsa: Asmat, Paniai dan Lanny Jaya. Sekber Kabupaten Asmat berkoordinasi dengan Bank Papua dalam menentukan titik-titik pelayanan pembayaran dana. Binam, ibu kota Distrik Suator, adalah salah satu titik pembayaran yang dipilih, bersama dengan beberapa titik pembayaran lain di Kabupaten Asmat. Titik pembayaran di Binam melayani penerima manfaat dari kampung-kampung di Distrik Suator, Distrik Juotu, Distrik Braza dan Distrik Koroway. Distrik Suator sendiri jaraknya 134 km dari Agats, ibukota Kabupaten Asmat. Jarak tempuh Agats-Suator kurang lebih 5 jam dengan *speedboat*.

Kepastian keamanan selama kegiatan pembayaran dana menjadi hal yang penting. Di sinilah Sudirman dan timnya berperan banyak.

“Saya bagi anggota di tiga area. Ada yang bertugas di swalayan, ada di kantor Bank Papua, dan ada juga yang membantu TNI di area antrian. Sedang lainnya patroli,” kata pria berkumis dan murah senyum ini, sambil memantau antrian masyarakat di Bank Papua. Selama hari-hari pelayanan pembayaran, sejak pagi, selepas apel, Sudirman berpindah-pindah memantau situasi setiap area, lengkap dengan pengeras suara.

Selain memastikan keamanan dan ketertiban pelayanan, Sudirman bahkan membantu menjelaskan kepada masyarakat tentang mekanisme pelayanan dan melakukan edukasi tentang pemanfaatan dana. Berbekal buku saku yang telah disiapkan oleh Sekber Asmat, Sudirman penuh percaya diri menjelaskan tentang tujuan program dan bagaimana dana harus digunakan dengan baik. Buku saku ini menjadi rujukan bagi setiap orang atau institusi dalam

Strategi melibatkan tokoh kampung seperti kepala kampung atau tokoh adat di Suator hanya salah satu contoh tentang pentingnya 'memahami kondisi warga' terutama di daerah pelosok Papua.





Foto : Syaifullah/Yayasan BaKTI

berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat terkait BANGGA Papua.

Selain dari buku saku itu, Sudirman juga mempelajari program BANGGGA Papua dari pertemuan-pertemuan dengan Sekber Asmat pada saat sosialisasi pra-pembayaran di kantor Distrik Suator. Ia tidak segan bertanya kepada anggota Sekber bila ada hal-hal yang ia kurang mengerti. Berbekal pengetahuan ini, Sudirman aktif meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program BANGGA Papua. Ia menjadi agen informasi bagi Sekber Asmat.

Kepolisian dan TNI terlibat aktif dalam kegiatan ini. Selain diselenggarakan oleh tim Polres Suator, pengamanan pembayaran ini juga dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait setempat seperti kepala distrik, dan Posramil, kepala Puskesmas dan tokoh agama. Keterlibatan pihak-pihak ini menunjukkan dukungan mereka kepada program BANGGA Papua.

Mama Bernadetta

Sudirman bukan satu-satunya orang yang sibuk selama kegiatan pembayaran dana BANGGA Papua di Distrik Suator. Ada juga mama Bernadetta, seorang guru SD, yang hadir untuk mendampingi penerima manfaat.

“Mama-mama minta saya menemani mereka untuk membantu mendampingi selama pelayanan di Suator,” ia menjelaskan perannya. Bernadetta sendiri terdaftar sebagai salah satu penerima manfaat Program BANGGA Papua karena dua orang anaknya masih berusia di bawah empat tahun.

Mirip dengan pengalaman Sudirman, Mama Bernadetta memahami program BANGGA Papua

setelah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan Sekber Asmat di Distrik Suator pada bulan Desember 2018. Bernadetta hadir disosialisasi itu mewakili tenaga pengajar di sekolah tempatnya menjadi guru. Pengetahuan itulah yang mendorong keterlibatannya sebagai pendamping mama-mama lain dalam kegiatan pembayaran dana.

“Antrian hari ini sangat panjang. Banyak warga kampung datang sebelum jadwalnya. Jadi saya inisiatif mengumpulkan mereka dan memberikan arahan agar lebih tertib dan mengerti bagaimana mengikuti prosedur pelayanan,” Mama Bernadetta menjelaskan sambil mengatur mama-mama yang berkumpul.

Saat itu, hari ketiga pelayanan pembayaran. Jumlah warga yang berkumpul dari kampung-kampung, membludak. Tidak bisa ditolak, dan tidak bisa dihindari, karena beberapa hari sebelumnya, mereka tidak bisa datang karena kondisi cuaca yang tidak menentu.

“Kunci menghadapi warga sebanyak ini adalah koordinasi. Kita tidak bisa menyelesaikan sendiri permasalahan. Kita butuh bekerjasama dengan semua yang terlibat,” katanya.

Peran kepala kampung dan kepala distrik sangat menentukan kelancaran pelayanan, seperti situasi pada kegiatan pembayaran saat itu.

“Mereka (kepala kampung/kepala distrik) yang paling tahu kondisi warganya. Saya selalu minta bantuan mereka terjemahkan penjelasan saya ke dalam bahasa (lokal), agar masyarakat lebih mudah paham,” lanjutnya lagi.

Strategi melibatkan tokoh kampung seperti kepala kampung atau tokoh adat di Suator hanya salah satu contoh tentang pentingnya 'memahami



Foto : Syaifullah/Yayasan BaKTI

Kiri: Kapolsek Suator, Sudirman, menjelaskan mekanisme pelayanan pembayaran dan pemanfaatan dana BANGGA Papua. Kanan: Mama Bernadetta (samping baju warna merah) mendampingi ibu-ibu penerima manfaat.

kondisi warga' terutama di daerah pelosok Papua. 'Memahami kondisi warga' dalam hal ini berarti mengerti berbagai konteks lokal, yang lebih dari sekedar dapat berbicara dalam bahasa lokal. Memahami konteks lokal ini amat penting untuk memperbaiki kualitas komunikasi dan interaksi dengan masyarakat yang menjadi sasaran program.

Pemahaman konteks lokal ini juga yang mampu membangun kedekatan. Itu sebabnya Mama Bernadetta menjadi terpanggil untuk ikut mendampingi mama-mama lainnya selama kegiatan pembayaran dana. Mama Bernadetta membantu mereka dalam proses verifikasi: menjelaskan pertanyaan dari tim verifikasi kepada mama-mama dan membantu menjelaskan jawaban dari mama-mama kepada tim verifikasi, mendampingi mama-mama saat menarik dana dari rekeningnya, hingga saat mama-mama membelanjakan uangnya di swalayan BANGGA Papua.

Mama Bernadetta paham bahwa pembayaran dana lewat sistem transfer bank kepada masyarakat adalah hal yang baru. Mungkin saja beberapa mama yang hadir sudah punya nomor rekening bank sendiri dan sudah paham tentang proses transaksi di bank. Tetapi bagi mayoritas ibu/wali anak penerima manfaat, berinteraksi

dengan pihak bank adalah hal yang sama sekali tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena itulah, pendampingan Bernadetta kepada mama-mama penerima manfaat, sangat besar artinya bagi mereka.

Sudirman dan Bernadetta hanya dua dari sekian banyak orang, yang berupaya untuk menjadi lebih dari sekedar pelaksana tugas, ketika mereka bekerja di daerah pelosok. Mungkin sedikit, tetapi mereka ada. Mereka bekerja.

BANGGA Papua adalah program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Papua yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak orang asli Papua, dengan memanfaatkan dana Otonomi Khusus (Otsus). Melalui BANGGA Papua, Pemprov Papua sedang membangun generasi emas Papua. BANGGA Papua menyediakan dana bagi anak orang asli Papua yang berusia di bawah 4 tahun, untuk digunakan membeli atau menyediakan kebutuhan gizi dan kesehatan anak. Dana diberikan langsung kepada ibu dan ditransfer melalui rekening miliknya. BaKTI menerima mandat untuk mendukung komunikasi strategis BANGGA Papua, khususnya meningkatkan kapasitas komunikasi pelaksana program di provinsi dan kabupaten.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang BANGGA Papua, dapat menghubungi info@bakti.or.id

Merawat Kepedulian Masyarakat

Catatan tentang *Shelter* Warga

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**



Foto : Frans Gasal/Yayasan BaKTI

Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah sesuatu yang turun dari langit, tetapi merupakan perilaku dan masalah yang diproduksi dan dilestarikan.

Karena itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh sebagian kalangan diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan di masyarakat tertentu, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dianggap sebagian bagian dari cara mengajar dan mendidik.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di berbagai lingkungan dan strata sosial, karena masyarakat terbiasa dan permisif. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dianggap sebagai cara hidup dan cara mengatur masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Sebagian orang menganggap dengan melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka akan menghasilkan perempuan dan anak yang baik.

Cara berpikir dan bertindak yang salah tersebut harus diakhiri. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam hal ini pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan merendahkan martabat kemanusiaan.

Untuk itu, upaya harus terus dilakukan dalam berbagai bentuk. Penanganan korban untuk menyelamatkan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan harus dilakukan, termasuk dengan penanganan cepat dan mendekatkan layanan.

Layanan yang diberikan kepada korban harus segera dan disesuaikan dengan kondisi korban. Dengan demikian, pelibatan masyarakat sangat penting dan strategis. Masyarakat harus menangani korban kekerasan di lingkungannya, baik untuk menyelamatkan korban maupun untuk menjaga ikatan sosial. Masyarakat harus responsif terhadap korban, namun harus proporsional, karena tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diekspos dan ditangani oleh lembaga formal.

Shelter Warga

Pembentukan *Shelter* Warga adalah bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk menangani perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Masyarakat perlu menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara kekeluargaan untuk menjaga lingkungan sosial terus kondusif. Kasus-kasus

***Shelter* Warga dibuat sebagai wadah dan penunjuk bagi masyarakat ketika harus menolong perempuan, anak, atau penyandang disabilitas yang membutuhkan.**

yang dianggap ringan dan dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak perlu dibawa ke lembaga formal yang lebih tinggi. Ini untuk menghindari korban dari proses formal berkepanjangan yang menguras energi, dan menyebabkan keretakan di masyarakat.

Shelter Warga dibuat untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan. *Shelter* Warga juga merupakan wadah masyarakat untuk berembuk menyelesaikan berbagai permasalahan perempuan dan anak. Keterlibatan dan kepedulian masyarakat, maka kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan dapat ditekan menjadi rendah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, Tenri A. Palallo yang menginisiasi pembentukan *Shelter* Warga di Kota Makassar menjelaskan bahwa, Pemerintah Kota Makassar hingga tingkat terendah, seperti Ketua RT dan RW pun tidak bisa mendeteksi semua kekerasan terhadap perempuan dan anak, jika masyarakat permisif dan tidak mau melaporkan kasus-kasus kekerasan. Menurut Tenri, biasanya masyarakat mau melaporkan jika korban sudah dalam kondisi sangat parah atau telah meninggal. Dibeberapa kasus merupakan kasus yang sangat ringan, yang tidak perlu dilaporkan ke lembaga apa pun, cukup



Kegiatan Diskusi Inspirasi BaKTI tentang *Shelter Warga* menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, Ibu Tenri A. Palallo dan Bpk. Sabir selaku Ketua *Shelter Warga* Kelurahan Manggala.
Foto : **Frans Gosali/Yayasan BaKTI**

diselesaikan oleh tokoh masyarakat setempat, Ketua RT atau RW. Namun, tidak jarang kasus-kasus ringan tersebut dilaporkan yang kemudian tidak jarang menyebabkan keretakan dalam hubungan kekeluargaan di masyarakat.

Sementara itu, Sabir, Ketua *Shelter Warga* Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Makassar, menyatakan bahwa dirinya dipilih oleh masyarakat untuk menjadi Ketua *Shelter Warga*, karena sebagai Ketua RT, dia telah melakukan tugas-tugas diantaranya adalah mendamaikan warganya ketika bertikai. Menurut Sabir, penanganan masalah perempuan dan anak di *Shelter Warga* adalah penanganan sementara, sebelum diteruskan ke P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Makassar. Itu apabila kasusnya berat, sedangkan

untuk kasus-kasus ringan, maka pengurus *Shelter Warga* memediasi sehingga diselesaikan secara kekeluargaan. “Di *shelter* kami, sudah ada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) diselesaikan secara kekeluargaan, karena kasusnya masih ringan, jadi pelaku dinasehati dan diberi peringatan.” Lanjut Sabir.

Apa yang disampaikan Tenri A. Palallo dan Sabir adalah pemaparan keduanya di acara Inspirasi BaKTI pada 22 Maret 2019 di Kantor BaKTI Makassar. Diskusi yang dipandu oleh Luna Vidya tersebut menampilkan *Shelter Warga* sebagai sebuah lembaga yang menginspirasi di Kota Makassar. *Shelter Warga* adalah upaya perlindungan perempuan dan anak di masyarakat.

Dari namanya, *Shelter Warga*, adalah rumah aman atau tempat berlindung yang disediakan oleh warga. Namun, *Shelter Warga* tidak hanya untuk menjadi rumah aman untuk korban, tetapi juga ikut menyelesaikan masalah perempuan dan anak di masyarakat secara kekeluargaan, serta ikut mencegah kekerasan terhadap perempuan dan



anak. Dengan demikian, *Shelter Warga* ikut menjaga hubungan kekeluargaan di masyarakat.

Prinsip penanganan perempuan dan anak di *Shelter Warga* adalah penanganan cepat, karenanya lembaga layanan harus dekat dengan warga. *Shelter Warga* juga menyediakan tempat perlindungan sementara atau rumah aman untuk korban, sebelum korban dirujuk ke lembaga layanan yang sesuai. Rumah Aman adalah rumah warga yang digunakan untuk perlindungan sementara dan hanya diketahui oleh pengurus *Shelter Warga*.

Merawat Kepedulian

Menurut Tenri A. Palallo, adalah keliru ketika menganggap masyarakat kota, apalagi kota besar tidak lagi peduli terhadap masalah di lingkungannya. Menurut Ibu Tenri, “masyarakat bukan kehilangan kepedulian terhadap masalah di lingkungannya, tetapi ketika mereka mau berbuat, misalnya membantu anak-anak yang mengalami kekerasan, mereka tidak tahu, apa yang harus

dilakukan, dan kalau anak membutuhkan perlindungan atau penanganan segera dia harus di bawa ke mana. Karena itu, *Shelter Warga* dibuat sebagai wadah dan penunjuk bagi masyarakat ketika harus menolong perempuan, anak, atau penyandang disabilitas yang membutuhkan.”

Shelter Warga merupakan inovasi DP3A Kota Makassar yang diapresiasi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise. Bahkan Menteri Yohana telah berkunjung dan berdialog langsung dengan pengurus *Shelter Warga* di Kelurahan Tamamaung.

Sementara Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI yang mengembangkan LKB (Layanan Berbasis Komunitas) juga mengadopsi *Shelter Warga* untuk perlindungan dan penanganan perempuan dan anak di masyarakat. Program MAMPU Yayasan BaKTI mereplikasi *Shelter Warga* di Kabupaten Tana Toraja, Kota Parepare (Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Kota Ambon (Maluku).

Sebagai sebuah inovasi, *Shelter Warga* mempunyai fungsi ganda. Pertama, sebagai lembaga di masyarakat untuk perlindungan perempuan dan anak. Pengurus *Shelter Warga* diberi pengetahuan dan keterampilan untuk ikut menangani perempuan dan anak korban kekerasan, seperti menjadi pendamping, memediasi kasus, merujuk kasus, dan membuat laporan kasus. Kedua, *Shelter Warga* berfungsi merawat kepedulian masyarakat terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya. Peduli pada tetangga dan lingkungan sekitar adalah budaya masyarakat Indonesia. Demikian juga penyelesaian masalah-masalah secara kekeluargaan adalah kebiasaan yang telah berakar di masyarakat Indonesia. *Shelter Warga* hanyalah mengingatkan dan mengaktifkan kembali budaya luhur tersebut, tetapi disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan jaman.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MAMPU BaKTI, dapat menghubungi info@bakti.or.id

Menuntaskan Akses Sanitasi dan Air Bersih Dengan Dana Desa

Oleh **HAMSAH SINRING**

Kamiutamakan bangun jamban keluarga dan air bersih. Ini penting untuk kesehatan warga karena kalau sakit mereka tidak bisa pergi berkebun. Pembangunan jalan tani itu penting juga, tapi kami fokus tuntas akses jamban dan air bersih. Jika semua punya jamban sehat, lingkungan juga sehat.” tegas Abdul Hasang Kepala Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kab. Bone.

Sanitasi dan air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Keduanya saling berkaitan. Penyediaan fasilitas sanitasi layak sangat tergantung pada ketersediaan air minum yang layak. Begitu pun sebaliknya, untuk mendapatkan air minum yang aman diperlukan upaya pengelolaan sanitasi yang baik.

Di Kabupaten Bone, lain desa lain masalahnya. Ada desa kelebihan air tapi masih berperang melawan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dan ada desa kekurangan air justru sudah terbebas dari BABS. Itulah ragam situasi sanitasi dan air bersih sejumlah desa di bumi Arung Palakka saat ini. Masih banyak desa yang menghadapi masalah sanitasi dan akses air bersih.

Namun, penyelesaian masalah ini diyakini dr. Eko, Nugroho, M. Adm, Kes, Kabid Kesmas, Dinas Kesehatan Bone akan mampu diatasi dalam tahun 2019. Menurutnya, Bupati Bone, Dr. H. Andi Fashar Mahdin Padjalangi, M.Si, melalui sejumlah Peraturan Bupati sangat mendukung percepatan pencapaian akses air bersih dan sanitasi layak. Antara lain, Peraturan Bupati Bone No. 95 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa, bahwa pembangunan air bersih dan sanitasi menjadi kewenangan lokal berskala desa. Dan hal ini menjadi prioritas 2019 dengan menggunakan

Dana Desa. Oleh karenanya, dr. Eko optimis Bone menjadi kabupaten ODF (*Open Defecation Free*) tahun ini.

Bone memang satu-satunya kabupaten dengan desa dan kelurahan terbanyak di Sulawesi Selatan. Terdapat 328 desa dan 44 kelurahan yang ada di 27 kecamatan. Namun saat ini pemerintah dan warganya tengah berjuang menjadi kabupaten ODF atau kabupaten bebas BABS. Per Februari 2019 cakupan desa dan kelurahan ODF-nya telah 54.03% atau 201 desa. Kondisi itu hampir sebanding dengan capaian cakupan akses sanitasi 54.16% (Data Dinkes Bone). Tersisa 171 desa dan kelurahan yang masih berjuang untuk menikmati lingkungan sehat bebas dari Buang Air Besar Sembarangan.

Desa Jompie, Desa Cani Sirenreng di kecamatan Ulaweng, Desa Uloe Kecamatan Duaboccoe, dan Desa Lebbae Kecamatan Ajangale termasuk desa yang berjuang tuntaskan BABS paling lambat akhir 2019. Untuk itu keempat desa tersebut berkomitmen menuntaskan akses sanitasi (jamban) dan air bersih bagi warganya dengan menggunakan dana pemerintah pusat (Dana Desa).

Berbeda dengan keempat desa tersebut, Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina dan Desa Pinceng Pute Kecamatan Ajangale lebih cepat meraih desa ODF tahun 2017. Namun, menurut Andi Paelori, Kepala Desa Tanete Harapan deklarasi ODF itu bukan tujuan. “Masalah sanitasi masalah serius, penyakit yang ditimbulkannya harus dicegah. Itu menentukan kesehatan warga dan lingkungan. Kami harus selesaikan, istilahnya tanpa usulanpun kami harus anggarkan. Apalagi ada Dana Desa untuk itu.” ujar kepala desa peraih Pokja Desa Sehat Terbaik Provinsi Sulsel 2017.

Pelajaran berharga dari penyelesaian masalah sanitasi

Dari praktik penanganan masalah sanitasi dan air bersih di enam desa tersebut, di bawah tercatat pelajaran berharga yang gencar dilaksanakan desa lain di Kabupaten Bone:

1. Pendataan Partisipatif

Langkah awal penanganan masalah sanitasi dimulai dari pendataan. Keenam desa di atas mengelola pendataan secara partisipatif dengan melibatkan Puskesmas (sanitarian), Pokja Desa Sehat, Bidan Desa, Kader Posyandu, PKK, kepala dusun, Babinsa dan Babinkamtibmas. Dinas Kesehatan dan Puskesmas juga memberikan dukungan sinkronisasi hasil pendataan yang dikelola melalui Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK).



Foto-foto : Hamsah Sinring/Yayasan BaKTI

2. Advokasi Anggaran Sanitasi

Proses selanjutnya membahas data dan informasi sanitasi dalam Musyawarah Masyarakat Desa atau MMD. Melalui MMD semua data diverifikasi dan disinkronkan untuk selanjutnya menjadi input dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) selanjutnya selanjutnya dijabarkan ke dalam RAPBDes. Pemerintah Kecamatan melakukan verifikasi dan persetujuan RAPBDes. Pemerintahan desa menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa untuk kemudian menjadi dasar implementasi program sanitasi.

3. Pemberdayaan Lembaga yang Ada di Desa

Inisiatif Kepala Desa Tanete Harapan, Jompie, Uloe, Pinceng Pute, Lebbae dan Cani Sirenreng membangun partisipasi aktif segenap lembaga dan elemen di desanya seperti Pokja Desa Sehat sangat menentukan ketuntasan akses sanitasi jamban. Terlebih lembaga Pokja Desa Sehat didirikan berdasarkan amanat Peraturan Daerah Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat. Komponen lain yang dilibatkan mencakup Forum Koordinasi Kecamatan Sehat, sanitarian, kader kesehatan, kader PPK, bidan desa, dan tokoh masyarakat.

4. Regulasi Desa

Semua desa telah memiliki aturan yang menjadi dasar pelaksanaan penuntasan akses sanitasi jamban melalui pemanfaatan Dana Desa. Selain Peraturan Desa, kepala desa juga menerbitkan Surat Keputusan untuk semua jenis kegiatan sanitasi dan air bersih yang dilaksanakan, seperti SK desa tentang penggunaan air bersih, larangan buang air besar di sembarang tempat, program Jumat bersih, larangan membuang sampah di sungai, program rumah sehat, dan lain-lain. Pemerintah desa mengaku lebih aman

menggunakan Dana Desa untuk pembangunan sanitasi dan air bersih oleh karena didukung oleh Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Dana Desa.

5. Membangun Keswadayaan dan Kepemilikan Warga

Pemerintah desa mengembangkan pola pembangunan sanitasi semi swadaya dimana teknis pekerjaan fasilitas sanitasi dan air bersih dilaksanakan secara swadaya warga sementara material bangunan dengan Dana Desa. Misalnya kloset bantuan pemerintah desa dan pembangunan jamban dikerjakan warga secara swadaya. Demikian juga perawatan sumber air dan perpipaannya serta pemeliharaan MCK yang dikerjakan oleh warga masyarakat. Pola ini selain berhasil mengefektifkan anggaran juga menguatkan sikap memiliki terhadap hasil-hasil pembangunannya sendiri.

Swadaya warga untuk penyelesaian masalah sanitasi dan air bersih juga terus dikomunikasikan melalui mimbar masjid. Misalnya, kata Umar, Ketua BPD Desa Jompie, setiap Jumat warga selalu diingatkan tentang pentingnya bekerja sama menangani masalah sanitasi dan air bersih.

Pola penyelesaian masalah sanitasi dan air bersih seperti ini yang didukung Dana Desa terbukti telah mengangkat capaian Desa ODF di Kabupaten Bone. Ditahun 2016 tercatat hanya 10 desa dan kelurahan ODF. Saat ini per Februari 2019 jumlah desa dan kelurahan ODF meningkat tajam menjadi 201 desa dan kelurahan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program UNICEF - BaKTI, dapat menghubungi info@bakti.or.id

15 Tahun, Majalah **BaKTI**News**** dicetak dan didistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia.

Kini Anda dapat mengakses **BaKTI**News**** dari gawai Anda. Dapatkan informasi terkini inisiatif dan praktik cerdas pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Berbagai fitur menarik disajikan untuk memudahkan pembaca memilih artikel sesuai dengan *interest/minat* pembaca. Anda juga dapat berkontribusi mengirimkan artikel dan mendapatkan *update* berkala dari **BaKTI**News****. Segera kunjungi:

www.baktinews.bakti.or.id





Kegiatan di BaKTI

9 Mei 2019

Workshop Perencanaan Implementasi Program Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Sekolah

Bertempat di ruang pertemuan BaKTI, Yayasan Lemina melaksanakan workshop Perencanaan Implementasi Program Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Sekolah. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama antara UnionAID New Zealand yang didukung oleh Pemerintah Indonesia, New Zealand Embassy dan Yayasan BaKTI.

Pertemuan awal dihadiri oleh pihak sekolah dan perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Selain memperkenalkan tentang program yang akan dijalankan, pertemuan ini juga mengajak peserta untuk melihat kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan LemINA serta memberikan masukan dan saran terkait draft modul yang akan digunakan oleh guru sekolah dasar yang menjadi sasaran program.



Program Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Sekolah akan menasar satu sekolah terpilih dan melatih guru-guru di sekolah tersebut agar bisa memberikan pesan-pesan pencegahan kekerasan seksual kepada anak-anak. Melalui modul yang telah dibuat, guru akan mampu memahami isu kekerasan seksual dan juga ikut serta menciptakan sekolah yang ramah anak melalui SOP yang dibuat di akhir pelatihan.

Melalui Program Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Sekolah, diharapkan bisa menjadi salah satu langkah untuk mengurangi angka kekerasan seksual yang masih tinggi di Kota Makassar. Program ini juga ikut berkontribusi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta mewujudkan sekolah yang ramah bagi tumbuh kembang anak.

24 Mei 2019

Inspirasi BaKTI “Penyandang Disabilitas Perempuan berhadapan dengan Hukum (Kekerasan Seksual)”

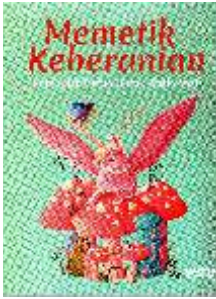
Kasus-kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum merupakan kasus yang kompleks, apalagi kekerasan seksual. Tidak hanya kemampuan dan ketrampilan, tetapi juga kesabaran dan empati dalam menangani korban. Hanya orang-orang “terpilih” yang mampu memutuskan dirinya untuk membantu dan membela penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Yayasan BaKTI atas dukungan program MAMPU-BaKTI menggelar Diskusi Inspirasi BaKTI dengan mengangkat tema “Penyandang Disabilitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Kekerasan Seksual)”. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam mendampingi penyandang disabilitas perempuan berhadapan dengan hukum, khususnya kekerasan seksual serta membuka ruang



dialog antar pelaku pembangunan untuk saling berbagi pengalaman terkait isu penyandang disabilitas.

Hadir sebagai narasumber adalah Kopol Rosmina dari Polda Sulawesi Selatan, Nurdayati dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan dan Fauziah Erwin dari Pergerakan Disabilitas Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Makassar. Diskusi ini dihadiri oleh 50 peserta berasal dari Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepolisian, LSM, dan media.



Memetik Keberanian - Kumpulan Cerita Untuk Anak-Anak

PENERBIT Gora Pustaka Indonesia

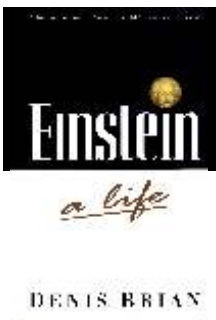
Anak-anak korban terdampak bencana perlu dipulihkan kembali mimpi-mimpinya. Anak-anak korban terdampak bencana membutuhkan pendampingan agar mereka tidak pernah merasa sendiri. Mereka harus dapat memetik dan memiliki keberanian kembali. Buku anak ini hadir sebagai jembatan untuk mempertemukan kembali dengan segala yang pernah raib dari mereka disebabkan bencana. Melalui bacaan yang menggugah harapan-harapan inilah, kita ingin meyakini, agar anak-anak dapat segera pulang menemui keceriaannya.



Hutan Rakyat; Periodisasi Sejarah Kebijakan dan Praktik Pengelolaan

PENULIS Ahmad Syahrul Mauludi dkk

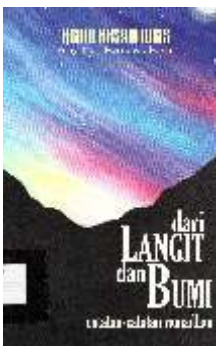
Pembangunan hutan rakyat di Jawa memiliki sejarah yang cukup panjang dan telah dikembangkan sejak tahun 1930 pada masa sebelum kemerdekaan. Buku ini menguraikan perjalanan sejarah terkait praktik-praktik pengelolaan dan kebijakan hutan rakyat dimulai sejak masa kolonial Hindia Belanda, periode Orde Lama, periode Direktorat Jenderal Kehutanan di masa Orde Baru, periode Departemen Kehutanan di Masa Orde Baru dan periode Reformasi.



Einstein, A Life

PENULIS Denis Brian

Identik dengan jenius, Albert Einstein menjadi salah satu orang paling terkenal di dunia. Einstein selalu digambarkan sebagai ilmuwan eksentrik. Namun lewat tulisan Denis Brian ini, kita bisa melihat sisi lebih pribadi dari seorang penemu $E=mc^2$, membuatnya lebih 'manusiawi' dengan kisah-kisah persahabatan dan percintaannya.



Dari Langit dan Bumi

PENULIS Abdul Rasyid Idris

Ibadah kepada Tuhan mesti berkolerasi dengan perilaku terhadap alam dan segenap ciptaannya. Makin baik ibadah sang hamba mesti kian baik pula perilakunya pada sesama manusia dan alam sekitarnya. Pesan-pesan agama dalam 30 tulisan dalam buku ini, disampaikan dengan bahasa bumi meski dengan mengutip bahasa langit. Dengan bahasa yang ringan, buku ini memberi pengetahuan penting dan pesan-pesan bijak bagi pembaca.